

LAPORAN KEUANGAN AUDITED

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM BANTEN



648991

**YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2023**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

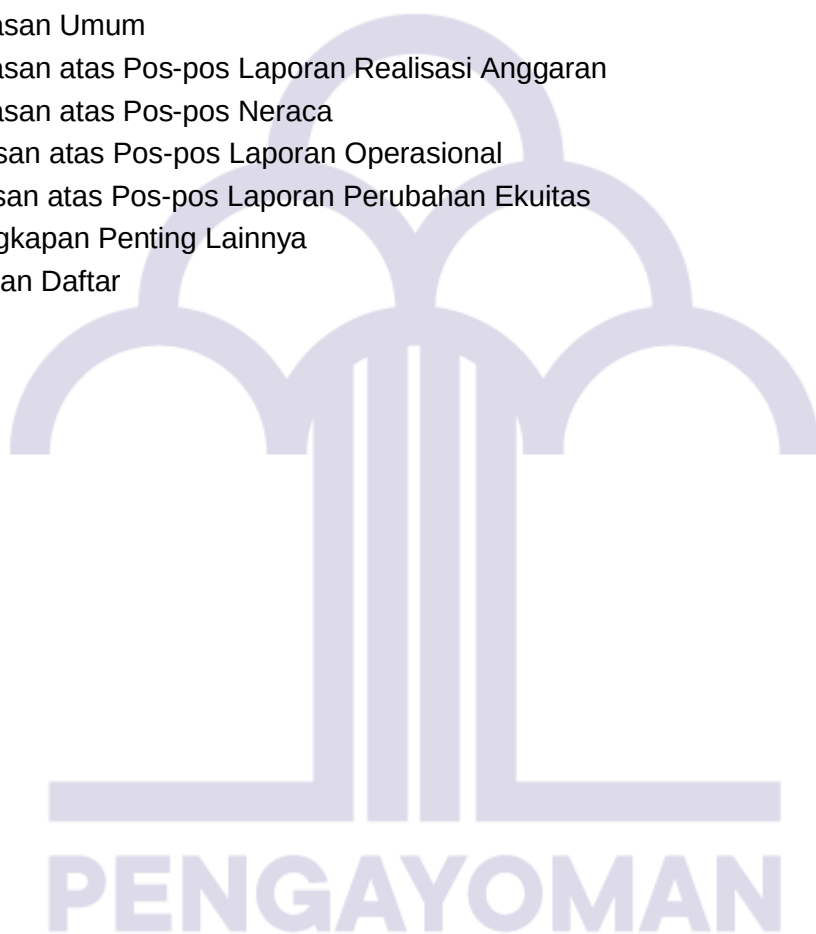
Serang, 31 Desember 2023
Kepala Pengguna Anggaran,



Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	



PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

PENGAYOMAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) per 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp788.745.600,- atau mencapai 99,9% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp788.886.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp77.554.800,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp77.554.800,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp77.554.800,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan

surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp847.823.602,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp847.823.602,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp847.823.602,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp34.128.202,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp847.823.602,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp891.250.200,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp77.554.800,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.05) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	788.886.000	788.745.600	99,98	911.161.239
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		788.886.000	788.745.600	99,98	911.161.239

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.05) NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	77.554.800	34.128.202
Jumlah Aset Lancar		77.554.800	34.128.202
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		77.554.800	34.128.202
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	77.554.800	34.128.202
JUMLAH EKUITAS		77.554.800	34.128.202
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		77.554.800	34.128.202

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.05)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	59.078.002	70.406.212
Beban Barang dan Jasa	D.4	247.151.000	286.859.750
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	541.594.600	624.301.489
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		847.823.602	981.567.451
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(847.823.602)	(981.567.451)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(847.823.602)	(981.567.451)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(847.823.602)	(981.567.451)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.05)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	34.128.202	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(847.823.602)	(981.567.451)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	891.250.200	1.015.695.653
EKUITAS AKHIR	E.5	77.554.800	34.128.202

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05)

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.05) berkedudukan di Serang-Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Bedasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Jalan KH Syam'un NO. 44 D Serang, Banten.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) mempunyai

tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan antara lain :

1. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pelaksanaan teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara;
3. Pemberian perizinan teknis atas pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan, perawatan tahanan dan pengelolaan benda sitaan negara

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

• Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

- **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh

pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- a. **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal

neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak	50%

	tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan

atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat

dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

• **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.05) melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-013.05.2.648991/2023 tanggal 17 November 2023. Satker 648991 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat perubahan DIPA. Sehingga berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja untuk DIPA 648991 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	788.886.000	788.886.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	788.886.000	788.886.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp0,-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-. Tidak terdapat realisasi pendapatan pada (013.05).

*Realisasi
Belanja
Negara
Rp788.745.600,-*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp788.745.600,- atau 99,98% dari anggaran belanja sebesar Rp788.886.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang	788.886.000	788.745.600	99,98
Belanja Modal	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Total Belanja Kotor	788.886.000	788.745.600	99,98
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	788.886.000	788.745.600	99,98

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,08% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh lebih maksimalnya penggunaan anggaran pada DIPA 648991 dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2022 terdapat AA yang baru dibuka mendekati akhir tahun.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	788.745.600	911.161.239	(13,44)
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	788.745.600	911.161.239	(13,44)

*Belanja
Pegawai
Rp0,-,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan

pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran Belanja Pegawai baik di TA 2023 atau TA 2022.

Belanja

Barang

Rp788.745.600,

-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp788.745.600,- dan Rp911.161.239,-. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 7,08% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan oleh lebih maksimalnya penggunaan anggaran pada DIPA 648991 dari tahun sebelumnya, yang mana pada tahun 2022 terdapat AA yang baru dibuka mendekati akhir tahun..

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	-	-	-
Belanja Bahan	119.160.000	141.889.750	
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	53.200.000	55.940.000	(4,90)
Belanja Barang Non Operasional Penanganan Pandemi	35.145.000	52.430.000	(32,97)
Belanja Sewa	14.946.000	1.600.000	
Belanja Jasa Profesi	24.700.000	27.000.000	(8,52)
Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-	8.000.000	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	541.594.600	624.301.489	(13,25)
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Belanja Persediaan Konsumsi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	788.745.600	911.161.239	(13,44)
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	788.745.600	911.161.239	(13,44)

Belanja

Modal Rp 0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 31

Desember 2022. Hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal pada TA 2023 dan 2022

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023
dan 31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi tersebut pada TA 2022 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah baik di TA 2023 atau TA 2022.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- tidak mengalami kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2023 dan 2022.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan
Mesin TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Komputer Unit	-	-	-
Peralatan Komputer	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2023.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja modal lainnya pada 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 31 Desember 2022 hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal tahun 2022 dan 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	REALISASI TA 2022	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Buku-buku perpustakaan (monografi)	-	-	-
Rak Besi	-	-	-
Lemari Besi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	0	0	0,00

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial pada TA 2023 ini.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan Pajak
Rp0,-,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Rp0,-,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak Terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar TPA
Rp0,-,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek
Rp0,-,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp0,-,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

*Persediaan
Rp77.554.800,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp77.554.800,- dan Rp34.128.202,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tidak terdapat Persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Tuntutan
Penjualan
Angsuran
Rp0,-*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

Rp0,-

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.

Peralatan dan

Mesin

Rp0,-

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. tidak terdapat aset berupa peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan.

Gedung dan

Bangunan

Rp0,-

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.

Jalan,Jaringan

dan Irigasi

Rp0,-

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

Aset Tetap

Lainnya

Rp0,-,-

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,-,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Peralatan dan Mesin. Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023.

*Aset Tak
Berwujud Rp0,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

*Aset Lain-Lain
Rp0,-*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain

merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Utang Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Banten (013.05) per tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp77.554.800,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp77.554.800,-, dan Rp34.128.202,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB

Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Pendapatan PNPB pada saat tanggal pelaporan.

Beban Pegawai

Rp0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2022	TH 2021	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Persediaan

Rp59.078.002,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp59.078.002,- dan

Rp70.406.212,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	59.078.002	70.406.212	-
Beban Persediaan Amunisi	-	-	-
Beban Persediaan pita cukai, materai	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	59.078.002	70.406.212	-

*Beban Barang dan
Jasa
Rp247.151.000,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp247.151.000,- dan Rp286.859.750,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	PENGEMB ALIAN BELANJA	TH 2022
Beban Barang Operasional	-	-	-
Beban Bahan	119.160.000	-	141.889.750
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	53.200.000	-	55.940.000
Beban Barang Non Operasional Penanganar	35.145.000	-	52.430.000
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Sewa	14.946.000	-	1.600.000
Beban Jasa Profesi	24.700.000	-	27.000.000
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	8.000.000
JUMLAH	247.151.000	-	286.859.750

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban

Pemeliharaan Rp0,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	Pengembalian Belanja	TH 2022
Beban Pemelihraan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemelihraan Gedung dan Bangunan Lainnya	-	-	-
Beban BMP dan Pelumas Khusus	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan untuk Suku Cadang	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja

Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Perjalanan Dinas
Rp541.594.600,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp541.594.600,- dan Rp624.301.489,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	Pengembalian Belanja	TH 2022
Beban Perjalanan Biasa	429.339.600		455.002.489
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.300.000	-	24.684.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	36.855.000		32.675.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	54.100.000		111.940.000
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	541.594.600	-	624.301.489

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Rincian Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat untuk tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Barang Persediaan untuk diserahkan kepada Masyarakat	-	-
Beban Tanah untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Barang Fisik Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	-	-
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Bantuan Sosial Rp0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial dalam Bentuk Barang/ Jasa	-	-
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan mesin	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Amortisasi Software	-	-
Beban Penyusutan Lisensi	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Amortisasi Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional	-	-
Jumlah	-	-

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Rp0,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal

pelaporan

Beban Lain-lain

Rp0,-

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2023.

Surplus dari

Kegiatan Non

Operasional Rp0,-

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan TA 2022

URAIAN	30-Jun-23	30-Jun-22	NAIK (TURUN) %
Kegiatan Non Operasional	-	-	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	-	-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-

Pos Luar Biasa

Rp0,-

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp34.128.202,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp34.128.202,- dan Rp0,- .

Defisit LO

Rp847.823.602,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp847.823.602,- dan Rp981.567.451,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada tanggal pelaporan.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi pada tanggal pelaporan.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp891.250.200,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp891.250.200,- dan Rp1.015.695.653,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN

maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	788.745.600
Transfer Masuk	7.174.447.496
Transfer Keluar	(7.071.942.896)
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	891.250.200

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Desember 2023, DDEL sebesar Rp0,-, sedangkan DKEL sebesar Rp788.745.600,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer Masuk/Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp7.174.447.496,- dan Rp-7.071.942.896.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan

transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2022. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0,-. Tidak terdapat pengesahan Hibah untuk tahun 2023 dan 2022.

Ekuitas Akhir

Rp77.554.800,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp77.554.800,- dan Rp34.128.202,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 652306489911000
Nama Rekening : BPG 020 KNWL HUKUM DAN
HAM BANTEN 648991
Nama Bank : BRI CABANG SERANG
Surat Izin : S-1611/WPB.12/KP.05/2020
Tanggal : 24-07-2020

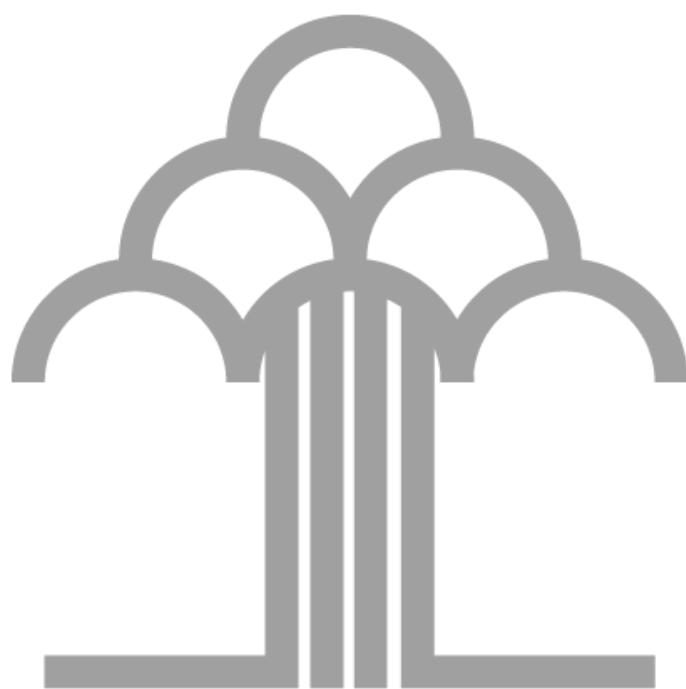
2. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W.12.411.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12.70.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pegawai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2023, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 :

KPA : Dodot Adikoeswanto
PPK : Emiel Amarulla
Bendahara : Hafin Jaya Wardana

3. Di TA 2023 ini tidak terdapat Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 (521131);

4. Di TA 2023 ini tidak terdapat Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid 19 (522192);
5. Di TA 2023 ini terdapat Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 (521241), Belanja yang dilakukan pada Semester II, telah dilakukan revisi ke akun Belanja Bahan (521211) sesuai dengan arahan Surat Edaran dari Menteri Keuangan RI.



**PENGAYOMAN
LAMPIRAN**

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648991) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 17/05/24 6:27 AM

Tgl Cetak : 17/05/24 1:29 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	59,078,002	70,406,212	(11,328,210)	(16.09)
Beban Barang dan Jasa	247,151,000	286,859,750	(39,708,750)	(13.843)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	541,594,600	624,301,489	(82,706,889)	(13.248)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648991) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 17/05/24 6:27 AM

Tgl Cetak : 17/05/24 1:29 PM

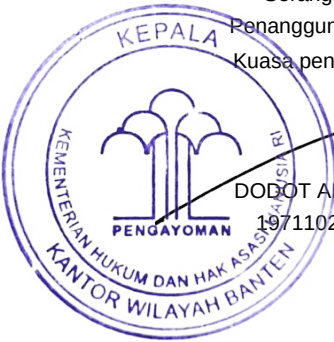
Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	847,823,602	981,567,451	(133,743,849)	(13.626)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(847,823,602)	(981,567,451)	133,743,849	(13.626)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(847,823,602)	(981,567,451)	133,743,849	(13.626)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(847,823,602)	(981,567,451)	133,743,849	(13.626)

Keterangan :
FINAL

Serang, 17 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa pengguna Anggaran



DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648991) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 17/05/24 1:29 PM
Halaman : 1
lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	34,128,202	0	34,128,202	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(847,823,602)	(981,567,451)	133,743,849	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	891,250,200	1,015,695,653	(124,445,453)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	43,426,598	34,128,202	9,298,396	-
EKUITAS AKHIR	77,554,800	34,128,202	43,426,598	-

Keterangan :
FINAL

Serang, 17 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa pengguna Anggaran
DIBOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN PEMASYARAKATAN 05
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648991

Tgl Data : 17/05/24 6:27 AM
Tgl Cetak : 17/05/24 1:29 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	788,886,000	788,745,600	(140,400)	100	913,365,000	911,161,239	(2,203,761)	100
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	788,886,000	788,745,600	(140,400)	100	913,365,000	911,161,239	(2,203,761)	100
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN PEMASYARAKATAN 05
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648991

Tgl Data : 17/05/24 6:27 AM
Tgl Cetak : 17/05/24 1:29 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	788,886,000	788,745,600	(140,400)	100	913,365,000	911,161,239	(2,203,761)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Serang, 17 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa pengguna Anggaran



DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (05) DITJEN PEMASYARAKATAN

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648991) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 17/05/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 17/05/24 1:28 PM

Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	77,554,800	34,128,202	43,426,598	127.25
JUMLAH ASET LANCAR	77,554,800	34,128,202	43,426,598	127.25
JUMLAH ASET	77,554,800	34,128,202	43,426,598	127.25

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	77,554,800	34,128,202	43,426,598	127.25
JUMLAH EKUITAS	77,554,800	34,128,202	43,426,598	127.25
JUMLAH EKUITAS	77,554,800	34,128,202	43,426,598	127.25
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	77,554,800	34,128,202	43,426,598	127.25

Keterangan :

FINAL

Serang, 17 Mei 2024
Penanggung Jawab UAKPA
Kuasa pengguna Anggaran
DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

Sub Bag Pengelolaan Keu dan BMN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN

Banten Prestasi PASTI Jawara

KEMENTERIAN HUKUM DAN
HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH BANTEN

ei gov

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN 648999 (SEKRETARIAT JENDERAL / 013.01)

Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2023

BerAKHLAK
Berakhlak dalam Pelayanan Publik
Harmonis Layak Adaptif Kolaborasi



**SEMAKIN
PASTI**

**REFORMASI
HUKUM**

**PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA**

**#bangga
melayani
bangsa**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (01) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Triwulan III pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (01) (648999) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (01) (648999). Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dedot Adikoewanto
NIP. 197110211994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	28
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	39
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	58
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	65
F. Pengungkapan Penting Lainnya	69
VI. Lampiran dan Daftar	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id,
Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Triwulan III Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 30 September 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoewanto
NIP. 197110211994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) per 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp300.643.629,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.205.898.969,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp22.215.698.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp65.179.358.443,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp9.879.788,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp65.169.478.655,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp27.008.581,- dan Rp65.152.349.862,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp28.061.121,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp19.355.777.098,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp19.327.715.977,-. Defisit dari Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp461.312.319,- dan sebesar Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp19.789.028.296,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp61.260.660.338,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp19.789.028.298,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai (Rp231.760.948,-) dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp23.912.478.768,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp65.152.349.862,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.01) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	300.643.629	-	95.619.279
JUMLAH PENDAPATAN		-	300.643.629	0,00	95.619.279
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	9.155.936.000	9.148.653.427	99,92	6.900.938.542
Belanja Barang	B.4	8.933.722.000	8.932.178.022	99,98	4.923.104.571
Belanja Modal	B.5	5.126.040.000	5.125.067.520	99,98	1.291.230.350
Belanja Bantuan Sosial		-	-		-
JUMLAH BELANJA		23.215.698.000	23.205.898.969	99,96	13.115.273.463

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.01)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022 (Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran		-	-
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas		-	-
Piutang Bukan Pajak		-	-
Bagian Lancar TP/TGR		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		-	-
Belanja Dibayar di Muka		-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima		-	-
Persediaan	C1	9.879.788	42.880.302
Jumlah Aset Lancar		9.879.788	42.880.302
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C4	44.142.991.000	44.142.991.000
Peralatan dan Mesin	C5	15.764.974.026	14.578.112.066
Gedung dan Bangunan	C6	22.610.168.921	17.638.852.063
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya	C7	109.218.442	109.218.442
Konstruksi dalam pengerjaan	C8	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C9	(17.457.873.734)	(15.941.146.339)
Jumlah Aset Tetap		65.169.478.655	60.528.027.232
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C10	-	-
Aset Lain-Lain	C11	2.852.000	3.296.881.676
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C12	(2.852.000)	(2.589.239.287)
Jumlah Aset Lainnya		-	707.642.389
JUMLAH ASET		65.179.358.443	61.278.549.923
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C13	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C14	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C15	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C16	27.008.581	25.639.585
Hibah yang belum disahkan	C17	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		27.008.581	25.639.585
JUMLAH KEWAJIBAN		27.008.581	25.639.585
EKUITAS			
Ekuitas	C18	65.152.349.862	61.260.660.338
JUMLAH EKUITAS		65.152.349.862	61.260.660.338
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		65.179.358.443	61.286.299.923

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.01)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	28.061.121	22.129.824
JUMLAH PENDAPATAN		28.061.121	22.129.824
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	9.148.653.427	9.174.506.067
Beban Persediaan	D.3	126.689.554	235.943.992
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.816.662.271	3.312.745.010
Beban Pemeliharaan	D.5	2.266.941.613	2.043.328.000
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.754.885.098	535.704.937
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat		-	-
Beban Bantuan Sosial		-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	1.241.945.135	1.002.427.325
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-
JUMLAH BEBAN		19.355.777.098	16.304.655.331
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(19.327.715.977)	(16.282.525.507)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	(461.312.389)	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		246.330.000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		707.642.389	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.9	70	52.212.816
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(461.312.319)	52.212.816
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(19.789.028.296)	(16.230.312.691)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(19.789.028.296)	(16.230.312.691)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
EKUITAS AWAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.1	(2.261.915.856)	(1.964.034.532)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2	2.270.533.856	1.964.034.532
EKUITAS AKHIR		8.618.000	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1366);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);
12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-21/PB/PB.6/2023 tanggal 05 Juli 2023 Hal: Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2023.
13. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-31/PB/2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian / Lembaga Tahun 2023 (Unaudited);
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Ham RI Nomor : SEK.3-KU.04.01-02 tanggal 04 Januari 2024 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Ham Tahun 2023 Unaudited.

A.2.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)

**Profil dan
Rencana
Strategis**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pelaksana tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, salah satunya adalah provinsi Banten yang bertempat di Jalan Brigjen Syamun No.44 Kel. Kotabaru, Kecamatan Serang, Kota Serang. Awal Kantor Wilayah dibentuk pada tahun 1982 diberi nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Keberadaannya diatur berdasarkan Surat

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.PR07.10 Tahun 1982 yang kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-03.PR-07.10 Tahun 1992.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah disebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang kepala Kantor Wilayah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi. Kanwil Kemenkumham terdiri dari 4 (empat) divisi yang terdiri dari :

1. Divisi Administrasi

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan pembinaan teknis di wilayah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

2. Divisi Pemasyarakatan

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pemasyarakatan berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan

3. Divisi Keimigrasian

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang keimigrasian berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi

4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia

bertugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten membawahi 19 (sembilan belas) Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 9 (sembilan) Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), 3 (tiga) Rumah Tahanan Negara (RUTAN), 3 (tiga) Balai Pemasyarakatan (BAPAS), 1 (satu) Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN), dan 3 (tiga) Kantor Imigrasi.

Salah satu ciri khas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten adalah terletak pada bangunan gedung JDI (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) yang menyerupai bangunan Belanda karena pada arsitektur pintu dan jendelanya yang sejak awal pembangunan tidak pernah diganti dan dipertahankan sampai saat ini.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01). Rencana strategis Sekretariat Jenderal pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sesuai dengan tugas dimaksud.

A.2.2. Visi, Misi, Nilai, Tujuan, dan Sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

A. Visi

Berdasarkan identifikasi dan analisa lingkungan strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

“Masyarakat memperoleh Kepastian Hukum”

Visi ini lebih menekankan pada orientasi masa depan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan mengacu kepada kompetensi inti (business) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yakni Fungsi Pembentukan Hukum, Fungsi Pelayanan Hukum, Fungsi Penegakan Hukum, dan Fungsi Pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dikaitkan dengan Visi Pemerintah yakni menuju Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan.

B. Misi

Pada dasarnya misi merupakan sesuatu yang harus diemban oleh organisasi dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai suatu uraian untuk memperjelas dan menjabarkan visi yang telah ditetapkan. Pernyataan misi ini menjawab kebutuhan penerima layanan yang harus dipenuhi oleh organisasi sesuai dengan karakteristik dan kompetensi inti organisasi.

Oleh sebab itu berdasarkan analisa strategis dikaitkan dengan visi operasional organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

- a. Mewujudkan peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas;
- b. Mewujudkan pelayanan hukum yang berkualitas;
- c. Mewujudkan penegakan hukum yang berkualitas;
- d. Mewujudkan penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia;
- e. Mewujudkan layanan manajemen administrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; serta
- f. Mewujudkan aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

C. Nilai

Untuk memandu pencapaian visi dan misi serta untuk

mewujudkan tujuan dan sasaran diperlukan nilai-nilai yang digunakan sebagai pedoman bagi seluruh insan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nilai ini mendukung dan memandu di saat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan. Ada pun nilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah:

1. Profesional

Aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika, dan integritas profesi.

2. Akuntabel.

Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

3. Sinergi

Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas.

4. Transparan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

5. Inovatif

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif

untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

D. Tujuan

Dalam penyusunan rencana strategis tujuan adalah kondisi yang akan atau harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan apa yang telah dibayangkan sebelumnya baik dalam konteks visi terutama dalam perspektif misi organisasi. Tujuan akan menjadi acuan dalam perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan dikaitkan dengan analisis strategis maka tujuan yang akan dicapai oleh kementerian adalah:

- a. Terwujudnya politik legislasi yang berkualitas melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana;
- b. Terwujudnya layanan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang cepat dan murah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang berkualitas di bidang keimigrasian, kekayaan intelektual, kerjasama timbal balik dengan negara lain, pembinaan masyarakatan serta efektifitas koordinasi antar instansi penegak hukum;
- d. Terwujudnya kebijakan nasional yang mendorong penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia;
- e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional;
- f. Terwujudnya aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional dan berintegritas.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) Semester II Tahun 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) adalah 1 satuan kerja. Rincian satuan kerja tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Satker UAPPA-W

No	Kode Wil	Satker	Jumlah Jenis Kewenangan				Jumlah Satke
			K	K	D	T	

1	29 00	Kantor Wilayah Kementerian	-	1	-	-	1
Jumlah			-	1	-	-	1

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh

aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 ini telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) . Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

• Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

**Pendapatan-
LO**

• **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

• **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- a. **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan

naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Tabel. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Persediaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mencakup:
 - barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, seperti barang habis pakai dan barang tak habis pakai;
 - bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, contohnya bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku dalam kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan;
 - barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan operasional.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengukuran nilai persediaan disajikan sebesar:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan opname fisik (stock opname) persediaan yang dilakukan setiap semester. Berdasarkan hasil opname fisik tersebut, selanjutnya dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin

berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.
- Kebijakan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset Tetap Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:
 - 1) Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/Daerah.
 - 2) Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional. Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa Aset Tetap:
 - a. Tanah,
 - b. Gedung dan bangunan, dan
 - c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi:

1) Jalan dan Jembatan

2) Bangunan Air

Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S761/MK.06/2018 tanggal 14 September 2018 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

**Penyusutan
Aset Tetap**

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai

berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

• **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang

jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Sampai dengan Semester II TA 2022, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) sudah 14 kali mengadakan revisi DIPA yaitu :

1. Revisi DIPA Ke 1 pada tanggal 31 Januari 2023 yaitu revisi anggaran operasional kantor;
2. Revisi DIPA ke 2 pada tanggal 09 Februari 2023 yaitu Revisi anggaran belanja modal;
3. Revisi DIPA ke 3 pada tanggal 06 Maret 2023 yaitu revisi Kegiatan Kepegawaian dan operasional kantor;
4. Revisi DIPA ke 4 pada tanggal 11 April 2023 yaitu Anggaran Biaya Tambahan Sewa mobil dinas
5. Revisi DIPA ke 5 pada tanggal 12 April 2023 yaitu revisi tentang Pembayaran Sewa Mobil Dinas;
6. Revisi DIPA ke 6 pada tanggal 12 April 2023 yaitu revisi tentang Pembayaran Sewa Mobil Dinas;
7. Revisi DIPA ke 7 pada tanggal 03 Mei 2022 yaitu Revisi Belanja Modal;
8. Revisi DIPA ke 8 pada tanggal 14 Juni 2023 yaitu Revisi ABT Belanja Modal;
9. Revisi DIPA ke 9 pada tanggal 22 Juni 2023 yaitu Revisi Pemeliharaan Gedung;
10. Revisi ke 10 pada tanggal 06 Juli 2023 yaitu Halaman III Dipa;
11. Revisi ke 11 pada tanggal 08 Agustus 2023 yaitu kegiatan HDKD;
12. Revisi ke 12 pada tanggal 22 Agustus 2023 yaitu ABT Belanja Pegawai;
13. Revisi ke 13 pada tanggal 07 September 2023 yaitu revisi

ABT Operasional.

- 14.Revisi ke 14 pada tanggal 27 September 2023 yaitu revisi Belanja Operasional;
15. Revisi ke 15 pada tanggal 13 Oktober 2023 yaitu revisi ABT Kegiatan Penerimaan CPNS;
- 16.Revisi ke 16 pada tanggal 25 Oktober 2023 yaitu kegiatan satu jam Bersama Menteri hukum dan ham RI;
- 17.Revisi ke 17 pada tanggal 13 Nopember 2023 yaitu revisi kegiatan SKD CPNS;
- 18.Revisi ke 18 pada tanggal 27 Nopember 2023 yaitu revisi ABT Pemeliharaan;
- 19.Revisi ke 19 pada tanggal 30 Nopember 2023 yaitu revisi optimalisasi belanja pegawai;
- 20.Revisi ke 20 pada tanggal 06 Desember 2023 yaitu revisi POK TUP;
- 21.Revisi ke 21 pada tanggal 20 Desember 2023 yaitu Pemutahiran Data KPA.

Sehingga rincian DIPA berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	8.323.322.000	9.155.936.000
Belanja Barang	6.519.349.000	8.933.722.000
Belanja Modal	413.408.000	5.126.040.000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	15.256.079.000	23.215.698.000

Kanwil Kemenkumham Banten 648999 mendapatkan Belanja Anggaran Tambahan (ABT) sebanyak 5 kali yaitu

1. Pada bulan mei 2023 belanja barang sebesar Rp873.354.000 untuk belanja sewa mobil dinas pimpinan kanwil kemenkumham Banten;

2. ABT belanja modal sebesar Rp 4.711.632.000 pada bulan Juni untuk belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan berupa pembangunan area parkir motor, pembangunan pagar pembatas lahan area kanwil, renovasi rumah dinas sebanyak 7 unit,
3. ABT Belanja Pegawai pada bulan 04 Agustus 2023 sebesar Rp832.614.919.000,- ,
4. ABT Belanja Operasional (daya dan jasa listrik dan pemeliharaan gedung) 23 Agustus 2023 sebesar Rp353.792.000,-,
5. ABT Pengadaan CPNS pada tanggal 27 September 2023 sebesar Rp730.811.000,-

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan

Rp300.643.629,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.300.643.629,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Pendapatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.01) berasal dari pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan dan penerimaan kembali belanja pegawai TAYL. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya dapat dilihat sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Semester II TA 2023

Uraian	2023		
	ANGGARAN	Realisasi	Realisasi
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	246.330.000	-
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	-	29.430.117	-
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	-	70	-
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	24.883.442	-
Jumlah Belanja	-	300.643.629	-

Pendapatan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham

Banten (013.01) terdiri dari :

1. Pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya sebesar Rp246.330.000,- terdiri dari hasil lelang antara lain :
 - a. Lelang senilai Rp111.300.000,- berupa 2 minibus 2 sepeda motor;
 - b. Lelang senilai Rp97.500.000,- berupa 1 minibus 1 station wagon
 - c. Lelang senilai Rp1700.000,- berupa lelang penghapusan 7 unit rumah dinas kantor dan 1 unit pagar permanen.
 - d. Lelang senilai Rp251.000,- berupa zitting plat
 - e. Lelang senilai Rp 33.000.000,- berupa barang-barang peralatan kantor seperti filling kabinet, kursi, meja dll
 - f. Lelang senilai Rp2.579.000,- berupa lelang bongkaran hasil renovasi Gedung kantor .
2. Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp 22.131.831,- terdiri dari :
 - Pendapatan Sewa Rumah Dinas bulan Januari sd Desember 2023 sebesar Rp11.385.117,- ,
 - Pendapatan Sewa Gedung Bangunan berupa Toko Koperasi selama 3 tahun Rp18.045.000,-
3. Pendapatan Kembali Belanja Pegawai TAYL sebesar Rp70,- merupakan penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yaitu pengembalian belanja pembulatan akibat dari pembayaran kekurangan gaji pangkat pengabdian an. Dita Yunistia F yang meninggal dunia di bulan Desember 2022.
4. Pendapatan Kembali Belanja Modal TAYL sebesar Rp24.883.442,- yaitu pengembalian belanja modal akibat dari audit Pengadaan Barang dan Jasa Inspektorat Jenderal bulan Januari 2023 temuan terhadap belanja modal tahun anggaran 2022 dengan rincian :

1. Terdapat kelebihan pembayaran Pengadaan Pekerjaan Renovasi Divisi Pelayanan Hukum dan Ham (Bidang Hukum dan Ham) dengan nilai kontrak Rp171.886.111, selisih yang dikembalikan ke negara sebesar Rp5.316.061,-
2. Terdapat kelebihan pembayaran Pengadaan Pekerjaan Renovasi Divisi Pemasarakatan dengan nilai kontrak Rp182.626.746, selisih yang dikembalikan ke negara sebesar Rp10.140.778,-
3. Terdapat kelebihan pembayaran Pengadaan Pekerjaan Arsitektur renovasi gedung ex PKK dengan nilai kontrak Rp165.888.140, selisih yang dikembalikan ke negara sebesar Rp9.426.603,-

Perbandingan Realisasi Pendapatan TA 2023 dan 2022

Uraian	Realisasi TA 2023	Realisasi TA 2022	Naik/ turun %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	246.330.000	-	-
Pendapatan Sewa Tanah Gedung dan Bangunan	29.430.117	43.726.175	(32,69)
Pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	70	6.188.453	(100,00)
Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	-	-	-
Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	24.883.442	45.704.651	(45,56)
Jumlah Belanja	300.643.629	95.619.279	214,42

dibandingkan dengan TA 2022 realisasi pendapatan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 214,42 % hal ini disebabkan karena di Tahun Anggaran 2023 terdapat penghapusan beberapa kendaraan dinas, perlengkapan kantor, bongkaran hasil renovasi gedung kantor yang sudah tidak layak digunakan.

Realisasi B.2 Belanja

Belanja Negara Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp23.205.898.969,- atau 99,99% dari anggaran belanja sebesar Rp23.215.698.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	9.155.936.000	9.155.893.747	100,00
Belanja Barang	8.933.722.000	8.932.178.022	99,98
Belanja Modal	5.126.040.000	5.125.067.520	99,98
Belanja Bantuan Sosial	-	-	#DIV/0!
Total Belanja Kotor	23.215.698.000	23.213.139.289	99,99
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	23.215.698.000	23.213.139.289	99,99

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 39,85% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya dikarenakan masa pandemi sudah berakhir sehingga kegiatan kegiatan yang tertunda akibat pandemi bisa dilaksanakan.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	9.155.893.747	9.174.506.067	(0,20)
Belanja Barang	8.932.178.022	6.093.443.520	46,59
Belanja Modal	5.125.067.520	1.330.930.350	285,07
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	23.213.139.289	16.598.879.937	39,85

Belanja B.3 Belanja Pegawai

Pegawai Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.155.893.747,- dan Rp9.174.506.067,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 0,28% dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak ada penambahan pegawai baru.

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2021	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai dan Tunjangan PNS	8.890.937.747	8.926.806.881	(0,40)
Belanja Pegawai dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	264.956.000	286.045.000	(7,37)
Belanja Vakasi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	9.155.893.747	9.212.851.881	(7,77)
Pengembalian Belanja Pegawai	7.240.320	38.345.814	-
Jumlah	9.148.653.427	9.174.506.067	(0,28)

Belanja

Barang Rp

8.932.178.022

,

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp8.932.178.022,- dan Rp6.093.443.520,- Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 46,59% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh sudah dicabutnya status darurat covid 19 sehingga beberapa kegiatan yang tertunda dilaksanakan pada saat pandemi bisa dilaksanakan pada saat ini.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.956.770.431	1.575.704.437	24,18
Belanja Barang Non Operasional	1.335.219.711	482.182.200	176,91
Belanja Jasa	1.524.672.129	1.237.116.373	23,24
Belanja Pemeliharaan	2.266.941.613	2.042.743.000	10,98
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.754.885.098	535.704.937	227,58
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.			-
Belanja Persediaan Konsumsi	93.689.040	219.992.573	(57,41)
Jumlah Belanja Kotor	8.932.178.022	6.093.443.520	46,59
Pengembalian Belanja	-	-	
Jumlah Belanja	8.932.178.022	6.093.443.520	46,59

Belanja Modal **B.5 Belanja Modal**

Rp

5.125.067.520

,-

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.125.067.520,- dan Rp1.330.930.350,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Pada TA 2023 Kanwil Banten 648999 terdapat belanja modal yaitu Belanja Modal Peralatan Mesin berupa pembelian CCTV, Mixer, PC Unit, Microphone, Laptop, smart door lock, Ac split, Video confrace, peralatan fitnes dan Pc tablet senilai total Rp377.933.220,- dan pembelian senilai Rp4.800.000,-

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan
31 Desember 2022*

URAIAN	REALISASI T.A. 2023	REALISASI T.A. 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	382.733.220	264.735.000	44,57
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.742	1.026.495.350	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	382.737.962	1.291.230.350	(70,36)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	382.737.962	1.291.230.350	(70,36)

Berdasarkan tabel diatas perbandingan realisasi belanja modal TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 75.37 %.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp382.733.220,- dan Rp264.735.000,-.

Pada TA 2023 satker 648999 memiliki belanja modal peralatan dan mesin adapun rincian belanja modal peralatan mesin TA 2023 sebagai berikut:

NO	Uraian	Kuantitas	Nilai
1	Lemari Kayu	36 Buah	Rp75.593.220,-
2	CCTV	1 Buah	Rp11.292.000,-
3	Acces Control System	3 Buah	Rp23.349.000,-
4	Meja Kerja Besi / Metal	30 Buah	Rp30.000.000,-
5	AC Split	7 Buah	Rp35.000.000,-
6	Microphone/ Wireless MIC	2 Buah	Rp13.000.000,-
7	Mixer Sound Sistem	1 Buah	Rp 5.630.000,-
8	Video Conference	1 Buah	Rp25.670.000,-

NO	Uraian	Kuantitas	Nilai
9	PC Unit	1 Buah	Rp30.000.000,-
10	Laptop	10 Buah	Rp80.000.000,-
11	Table PC	1 Buah	Rp12.999.000,-
12	Peralatan Fitnes	9 Buah	Rp40.200.000,-
JUMLAH			Rp383.408.000,-

Dibandingkan dengan TA 2022 realisasi belanja modal peralatan dan mesin TA 2023 mengalami kenaikan sebesar 27,05% dikarenakan salah satunya adalah komitmen dari pimpinan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten untuk memperhatikan kesehatan para pegawainya yang salah satunya dengan memfasilitasi dengan disediakannya peralatan fitnes yang bisa dipergunakan oleh seluruh pegawai Kanwil Kemenkumham Banten .

*Perbandingan Realisasi
Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022*

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Peralatan mesin	382.733.220	301.235.000	27,05
Peralatan Komputer	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	382.733.220	301.235.000	27,05
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	382.733.220	301.235.000	27,05

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.742.334.300,- dan Rp 1.029.695.350,-. Pada TA 2023 satker 648999 memperoleh ABT belanja modal sebesar Rp 4.711.632.000 pada bulan Juni untuk

belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan berupa pembangunan area parkir motor, pembangunan pagar pembatas lahan area kanwil, renovasi rumah dinas sebanyak 7 unit dan baru akan dilaksanakan di semester II TA 2023.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	(100)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	4.742.334.300	1.029.695.350	360,56
Jumlah Belanja Kotor	4.742.334.300	1.029.695.350	360,56
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah Belanja Modal	4.742.334.300	1.029.695.350	360,56

Dibandingkan dengan Tahun anggaran 2022 perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami kenaikan 360% hal ini dikarenakan adanya ABT untuk pembangunan penambahan nilai gedung dan bangunan berupa pembangunan area parkir motor, pembangunan pagar pembatas lahan area kanwil, renovasi rumah dinas sebanyak 7 unit.

PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Persediaan

Rp9.879.788,-

C.1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp9.879.788,- dan Rp42.880.302,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel

Rincian Persediaan TA 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

Persediaan	Tahun 2023	Tahun 2022
Barang Konsumsi	9.879.788	42.880.302
Barang untuk Pemerliharaan		
Suku Cadang		
Persediaan untuk Diserahkan kepada Masyarakat		
Persediaan Lainnya		
Jumlah	9.879.788	42.880.302

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik.

Aset Tetap

C.2. Aset Tetap

Rp65.169.478.655,-

Saldo Aset Tetap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten Setjen (648999) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp65.169.478.655 Rp60.535.777.232,- -.

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Kantor Wilayah Kementerian hukum dan Ham Banten Setjen (648999) berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya.

Tanah

C.2.1. Tanah

Rp44.142.991.000

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp44.142.991.000,- dan Rp44.142.991.000,-. Tanah seluas 3.560.m2 yang terletak di Jl. Brigjen KH Syamun No. 44 D Serang, pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten sudah bersertifikat senilai Rp 15.191.357.000,- dan terdapat penambahan aset tetap tanah seluas 4.350m2 senilai Rp28.951.634.000,- tanah tersebut merupakan tanah ex gedung PKK yang sudah digabungkan dengan tanah gedung utama kemenkumham Banten pada tahun 2020. Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Tabel

Rincian Mutasi Tanah

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	Rp44.142.991.000,-
Mutasi tambah:	-
Pembelian	-
Mutasi Kurang:	-
Revaluasi Aset	-
Penghapusan	-
Saldo Per 30 Desember 2023	Rp44.142.991.000,-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Desember 2023	0,-
Nilai Buku Per 30 Desember 2023	Rp44.142.991.000,-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel

Rincian Tanah TA 2022

(dalam rupiah)

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	2.560. m ²	Jl. Brigjen KH Syam'un No. 44D	14.453.248.000
2	4.350. m ²	Jl. Brigjen KH Syam'un No. 44D Tanah Rumah Negara	28.951.634.000
3	1.008 m ²	Jl. Mayor Syafei	227.409.000
4	1.000 m ²	Jl. Raya Malingping	510.700.000
Jumlah			44.142.991.000

Peralatan dan

Mesin

Rp15.764.974.026,-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp15.764.974.026,- dan Rp14.578.112.066,-

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel

Rincian Mutasi Peralatan dan Mesin

(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 01 Januari 2023	14.585.862.066
Mutasi tambah:	
Pembelian	412.733.220
Hibah	104.675.000
Transfer Masuk	975.545.740
Koreksi Tambah	
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	(281.892.000)
Reklas Keluar	(179.500.000)
Penghentian aset dari penggunaan	(145.550.000)
Saldo Per 31 Desember 2023	15.764.974.026
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2023	(13,865,150,559)
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	1.899.823.467

Mutasi tambah peralatan dan mesin antara lain adalah sebagai berikut:

pembelian CCTV, Mixer, PC Unit, Microphone, Laptop, smart door lock, Ac split, Video confrace, peralatan fitnes dan Pc tablet senilai total Rp412.733.220,- ;

Transfer Masuk peralatan kantor antara lain workstation, camera digital, PC unit, Laptop dan Printer senilai Rp975.545.740,-

Transfer keluar senilai Rp281.892.000,- terdiri dari 3 unit Meubelair senilai Rp4.246.000,-, 1 unit alat rumah tangga lainnya senilai Rp235.125.000,-, 2 Sepeda Motor senilai Rp33.901.000,- dan 1 Unit Personal Komputer senilai Rp8.620.000,-

Gedung dan Bangunan

Rp22.610.168.921,-

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp22.610.168.921 dan Rp17.638.852.063.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Gedung dan Bangunan TA 2023
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	17.638.852.063
Koreksi Pencatatan	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(3.857.272.300)
Koreksi susulan	(24.883.442)
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	3.214.056.600
Perolehan Lainnya	643.215.700
Penyelesaian Pembangunan dg KDP	4.742.334.300
Hibah Masuk	127.000.000
Transfer Masuk	126.866.000
Transfer Keluar	
Saldo Per 31 Desember 2023	22.610.168.921
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Des 2023	(3,581,200,675)

Nilai Buku Per 31 Desember 2023	19,028,968,246

Koreksi Pencatatan nilai berkurang sebesar (Rp24.883.442,) terdiri dari Pengadaan Pekerjaan :

1. Renovasi Divisi Pelayanan Hukum dan Ham (Bidang Hukum dan Ham) dengan nilai kontrak Rp182.626.746,- yang selisihnya sebesar Rp5.316.061,-
2. Renovasi Divisi Pelayanan Hukum dan Ham (Bidang Hukum dan Ham) dengan nilai kontrak Rp171.866.111,- yang selisihnya sebesar Rp10.140.778,-
3. Arsitektur Renovasi Gedung Ex PKK dengan nilai kontrak Rp165.888.140,- yang selisihnya sebesar Rp9.426.603,-

Aset Tetap Lainnya **C.2.4. Aset Tetap Lainnya**

Rp109.218.442,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp109.218.442,- dan 109.218.442,-.

Mutasi Aset tetap lainnya per tanggal pelaporan sebagai berikut :

Saldo per 01 Januari 2023	109.218.442
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
Mutasi kurang:	-
Saldo per 30 Juni 2023	109.218.442
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2023	(11.522.500)
Nilai Buku per 30 Juni 2023	97.695.942

Rincian Aset Tetap Lainnya dan Akumulasi disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan.

Akumulasi

Penyusutan Aset

Tetap

Rp17.457.873.734,-

C.4.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp17.457.873.734,- dan Rp15.941.146.339,-.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 September 2023.

Tabel
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam rupiah)

N o	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	15.764.974.026	13.865.150.559	1.899.823.467
2.	Gedung dan Bangunan	22.610.168.921	3.581.200.675	19.028.968.000
3.	Aset Tetap Lainnya	109.218.442	11.522.500	97.695.942
	Jumlah	38.484.361.389	17.457.873.734	21.026.487.409

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Lainnya

2.852.000,-

C.3. Aset Lainnya

Saldo Aset Lainnya Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp2.852.000,- dan Rp707.642.389,-.

Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01) terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

Aset Lain-lain

Rp2.852.000,-

C.3.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain per 30 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp2.852.000,- dan Rp3.296.881.676,-. Aset Lain-lain berupa Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.01).

Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Tabel
Rincian Mutasi Aset Lain-lain
(dalam rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2022	3.296.881.676
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi dari Aset Tetap	
Mutasi Kurang:	

Penggunaan kembali BMN yang dihentikan	-
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	3.294.029.676-
Saldo Per 31 Desember 2023	2.852.000,-
Amortisasi s.d. 31 Des 2023	2.852.000
Nilai Buku Per 31 Desember 2023	0,-

Transaksi penambahan dan pengurangan aset lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Penambahan adalah dari reklasifikasi 510 item yang sudah dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan lagi senilai Rp2.852.000,-

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp2.852.000,-)*

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 30 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar (Rp2.852.000) dan (Rp2.589.239.287). Rincian akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut:

*Tabel
Rincian Akumulasi Amortisasi dan Penyusutan Aset
Lainnya TA 2023
(dalam rupiah)*

No	Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan	Nilai Buku
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software			
	Jumlah			
B.	Aset Lain-lain	2.852.000	2.589.239.287	0
	Jumlah	2.852.000	2.852.000	0
	Total	2.852.000	2.852.000	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

*Pendapatan
Diterima di Muka
Rp27.008.581,-*

C.4.1 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp27.008.581,- dan Rp25.639.585,- dan. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Kanwil Kemenkumham Banten 648999 telah menyetorkan ke Kas Negara atas PNPB Sewa Gedung dan Bangunan, adapun rincian dari Pendapatan diterima di muka Kanwil Kumham Banten antara lain :

1. Sewa Gedung (Rumah Prestasi) Rp 11.707.308,- (selama 3 tahun mulai dari 14 Maret 2022 sampai dengan 13 Maret 2025),
2. Sewa Gedung (Kantin) Rp 2.277.920,- (selama 3 Tahun mulai dari 14 Maret 2022 sampai dengan 13 Maret 2025),
3. Sewa Gedung (Toko Koperasi Kanwil Kumham Banten) Rp 13.023.353,- (selama 3 Tahun mulai dari 02 Maret 2023 sampai dengan 01 Maret 2026)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 225/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Penerapan Standar Akuntanasi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Pusat, untuk transaksi belanja dibayar dimuka akan dilakukan jurnal penyesuaian per 31 Desember.

Ekuitas

C.5 Ekuitas

Rp61.873.528.332,- Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp61.873.528.332,- dan Rp61.260.660.338,-. Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp28.061.121,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.061.121,- dan Rp22.129.824,- pendapatan tersebut merupakan pendapatan Negara bukan pajak.

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	28.061.121	22.129.824	26,80
Jumlah	28.061.121	22.129.824	26,80

Pendapatan Negara Bukan Pajak berupa Sewa Tanah Gedung dan Bangunan sebesar Rp 28.061.121,- Nilai tersebut dibandingkan dengan nilai PNB pada LRA dan nilai akun-akun terkait pengakuan PNB secara akrual pada neraca tidak terdapat selisih.

Beban Pegawai

Rp9.148.653.427,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.148.653.427,- dan Rp Rp9.174.506.067,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Beban belanja pegawai TA 2023 mengalami penurunan 0,28 % dari tahun anggaran sebelumnya hal ini disebabkan karena tidak adanya penambahan pegawai baru ditahun 2023 ini.

*Rincian Beban Pegawai
31 Desember 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI TA 2023	TH 2022	NAIK (TURUN) %
Beban Gaji	8.883.697.427	8.888.461.067	(0,05)
Beban Tunjangan-Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	264.956.000	286.045.000	(7,37)
Jumlah	9.148.653.427	9.174.506.067	(0,28)

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan

Rp128.689.554,-

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp128.689.554,- dan Rp235.943.992,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	31-Dec-22	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	126.689.554	235.943.992	- 46,31
Beban Persediaan Amunisi	-	-	-
Beban Persediaan pita cukai, materai	-	-	-
Beban Persediaan Bahan Baku	-	-	-
Beban Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	126.689.554	235.943.992	- 46,31

*Beban Barang dan
Jasa
Rp4.816.662.271,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.816.662.271,- dan Rp 3.312.745.010,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	PENGEMBALIAN BELANJA	TH 2022
Beban Keperluan Perkantoran	1.756.681.500,		1.397.615.385,
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9.999.731,		10.912.452,
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	145.200.000,		125.950.000,
Beban Barang Operasional Lainnya	37.923.000,		23.046.600,
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	6.966.200,		18.180.000,
Beban Bahan	916.534.711,		316.657.600,
Beban Honor Output Kegiatan	65.900.000,		43.600.000,
Beban Barang Non Operasional	322.785.000,		121.924.600,
Beban Peralatan dan Mesin -	30.000.000,		17.742.000,
Beban Langganan Listrik	276.139.104,		199.260.373,
Beban Langganan Telepon	3.996.274,		2.300.000,
Beban Sewa	1.112.210.000,		916.080.000,
Beban Jasa Profesi	58.199.000,		10.000.000,
Beban Jasa Lainnya	65.472.023,		90.700.000,
Beban Jasa - Penanganan	8.655.728,		18.776.000,
Beban Aset Ekstrakomtabel			
			0
JUMLAH	4.816.662.271	0	3.312.745.010
Jumlah Beban Barang dan Jasa	4.816.662.271		

Beban

Pemeliharaan

Rp2.266.941.613,-

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.266.941.613,- dan Rp2.043.328.000,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Rincian beban pemeliharaan untuk tahun 2023 dan TA 2022 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan TA 2023 dan TA 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	Pengembalian Belanja	TH 2022
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.211.695.223,	-	867.298.000,
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,	-	
Beban BMP dan Pelumas Khusus		-	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1.055.246.390,	-	1.175.445.000,
Beban Persediaan untuk Pemeliharaan	0,	-	585.000,
Beban Persediaan suku cadang		-	
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		-	
Beban Pemeliharaan Jaringan		-	
Beban Pemeliharaan Lainnya		-	
Jumlah	2.266.941.613	-	2.043.328.000

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Perjalanan Dinas

Dinas

Rp1.754.885.098,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.754.885.098,- dan Rp535.704.937,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	Pengembalian Belanja	TH 2022
Beban Perjalanan Biasa	1.607.985.098,		513.804.937,
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	57.450.000,	-	21.900.000,
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	89.450.000		-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	1.754.885.098	-	535.704.937

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat

selisih.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp1.241.945.135,-

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.241.945.135,- dan Rp1.002.427.325,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2023 dan 2022

URAIAN JENIS BEBAN	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Penyusutan Peralatan mesin	712.201.362	516.384.807
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	529.743.773	463.175.575
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	-	-
Beban Penyusutan Irigasi	-	-
Beban Penyusutan Jaringan	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Amortisasi Software	-	-
Beban Penyusutan Lisensi	-	-
Beban Penyusutan Aset Lainnya	-	-
Beban Penyusutan Amortisasi Aset tak berwujud yang tidak digunakan dalam operasional	-	22.866.943
Beban Penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional	-	-
Jumlah	1.241.945.135	1.002.427.325

Surplus Pelepasan Aset Non Lancar
Rp(461.312.389),-

D.8 Surplus Pelepasan Aset Non Lancar

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten 648999 merupakan pendapatan hasil

Penjualan/Lelang Barang Persediaan, Aset Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin yang dihapuskan.

Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar-LO Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp(461.330.000),- dan 0,- .

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp(461.312.319),-*

D.9 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp(461.312.310),- dan Rp52.212.816,-.

Tabel. Rincian Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Akun	Uraian	Jumlah
425911	Pendapatan dari kegiatan Non	-70,
425913	Pendapatan Pelepasan aset non	246.330.000,
	Beban Pelepasan aset Non Lancar	-707.642.389,
JUMLAH		-461.312.459,

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp.61.260.660.338,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp61.260.660.338,- dan Rp60.600.209.777,-.

Defisit LO

Rp19.789.028.296,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp19.789.028.296,- dan Rp16.230.312.691,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Koreksi Nilai Aset

Tetap Non

Revaluasi

(Rp231.760.948,-)

E.3. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Januari 2022 adalah sebesar (Rp 231.760.948,-) dan (Rp87.841.740,-). Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Terdapat koreksi atas reklasifikasi sebesar (Rp231.760.948,-) terdiri dari Rp24.863.442,- merupakan koreksi akibat temuan inspektorat jenderal pekerjaan TA 2022, dan Rp206.897.506,- merupakan koreksi dari akumulasi penyusutan dari koreksi pencatatan aset tetap .

Transaksi Antar

Entitas

Rp23.912.478.768-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp23.912.478.768,- dan Rp16.978.604.992,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	23.205.898.969,
Diterima dari Entitas Lain	-300.643.629,
Transfer Keluar	-7.542.500,
Transfer Masuk	783.090.928,
Pengesahan Hibah Langsung	231.675.000,
Jumlah	23.912.478.768

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar (Rp300.643.629-) sedangkan DKEL sebesar Rp23.205.898.969,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp300.643.629,- dan Transfer keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar (Rp7.542.500,-).

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp231.675.000,-.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp231.675.000,- terdiri dari :

1. Hibah Mobil dari Pemkab Serang senilai Rp104.675.000,-
2. Hibah Bangunan Rumah Permanen dari Danu Ajibaskoro senilai Rp25.000.000,-
3. Hibah Bangunan Rumah Permanen dari Juhaeriyah senilai Rp 25.500.000,-
4. Hibah Bangunan Rumah Permanen dari Laela Sulastris senilai Rp25.500.000,-
5. Hibah Bangunan Rumah Permanen dari Siswandi senilai Rp25.500.000,-
6. Hibah Bangunan Rumah Permanen dari Wuryanti Handayani senilai Rp25.500.000,-

Ekuitas Akhir
Rp65.152.349.862,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp65.152.349.862,- dan Rp61.260.660.338,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN LAIN

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 008401002645307

Nama Rekening : BBPG020 KNWL HUKUM DAN HAM
BANTEN 648999

Nama Bank : BRI CABANG SERANG

Surat Izin : S-223/WPB.11/KP.020/2015

Tanggal : 17-02-2015

2. Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor:
W.12.411.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
dan HAM Banten Nomor W.12.70.KU.03.03 Tahun 2023
Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan
Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pegawai Pengelola
Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2023, daftar
Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 :

KPA : Dodot Adikoeswanto

PPK : Emiel Amarulla

Bendahara : Hafin Jaya Wardana

2. Rincian Capaian Kinerja sampai dengan September 2023
untuk DIPA Setjen Kanwil Banten antara lain :

1. Layanan Perkantoran Kanwil telah dilaksanakan
100 %

2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
telah dilaksanakan 100 %

3. Layanan Umum telah dilaksanakan 100 %
4. Layanan Sarana Internal telah dilaksanakan 100 %
5. Layanan Prasarana Internal telah dilaksanakan 100 %
6. Layanan SDM telah dilaksanakan 100%
7. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal telah dilaksanakan 100 %
8. Layanan Kehumasan dan Protokoler telah dilaksanakan 100%
9. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal telah dilaksanakan 100 %
10. Layanan Sarana dan Prasarana Internal telah dilaksanakan 100%.
11. Layanan Dukungan Manajemen Satker telah dilaksanakan 100 % .
12. Layanan Perkantoran telah dilaksanakan 100%.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

Sub Bagian Pengelolaan Keuangan
dan BMN



**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM BANTEN 648990
(DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI
HUKUM UMUM/ 013.03)**

Laporan Keuangan
Untuk Periode yang Berakhir Tanggal
30 Juni 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan *Unaudited* ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03). Di samping itu, laporan keuangan *Unaudited* ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 30 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	32
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	37
F. Pengungkapan Penting Lainnya	42
VI. Lampiran dan Daftar	



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id,
Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id.

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.03) yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 30 Juni 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,



Tejo Harwanto
NIP. 196603291990031001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) 30 Juni 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 30 Juni 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.291.590.280,- atau mencapai 57,14 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.260.316.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2023. Nilai Aset per 30 Juni 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp217.000.000,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp217.000.000,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp217.000.000,- dan Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.291.590.280 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp1.291.590.280),-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp.0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp1.291.590.280),-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp1.291.590.280),- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.291.590.280,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2023 adalah senilai Rp0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk 30 Juni 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 dan 30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-23		% thd Angg	30-Jun-22
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA	B.1.				
Belanja Pegawai		-	-		-
Belanja Barang	B.1.1	2260316000	1.291.590.280	57,14	999.368.325
Belanja Modal		-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial		-	-		-
JUMLAH BELANJA		2.260.316.000	1.291.590.280	57,14	999.368.325

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03) NERACA PER 30 JUNI 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-23	31-Des-22
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	100.000.000	-
Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	117.000.000	-
Piutang Bukan Pajak		-	-
Bagian Lancar TP/TGR		-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar		-	-
Belanja Dibayar di Muka		-	-
Persediaan		-	-
Persediaan yang belum diregister		-	-
Jumlah Aset Lancar		217.000.000	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR		-	-
Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang		-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah		-	-
Peralatan dan Mesin		-	-
Gedung dan Bangunan		-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-	-
Aset Tetap Lainnya		-	-
Konstruksi dalam pengerjaan		-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud		-	-
Aset Lain-Lain		-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya		-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		217.000.000	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.3	100.000.000	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4	117.000.000	-
Utang yang belum ditagihkan		-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar		-	-
Utang Jangka Pendek Lainnya		-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		217.000.000	-
JUMLAH KEWAJIBAN		217.000.000	-
EKUITAS			
Ekuitas		-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		217.000.000	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN
30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak		-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai		-	-
Beban Persediaan			
Beban Barang dan Jasa	D.1	836.398.000	872.704.445
Beban Pemeliharaan			
Beban Perjalanan Dinas	D.2	455.192.280	126.663.880
Beban Barang untuk Diserahkan kepada			
Beban Bantuan Sosial			
Beban Penyusutan dan Amortisasi			
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			
JUMLAH BEBAN		1.291.590.280	999.368.325
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.291.590.280)	(999.368.325)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.291.590.280)	(999.368.325)
POS LUAR BIASA			
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.291.590.280)	(999.368.325)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2023 DAN 30 JUNI 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	30-Jun-23	30-Jun-22
EKUITAS AWAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.1	(1.291.590.280)	(999.368.325)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN		-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.2	1.291.590.280	999.368.325
EKUITAS AKHIR		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A.PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.05/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
9. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 1366);

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1452);

12. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S-21/PB/PB.6/2023 tanggal 05 Juli 2023 Hal: Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2023.

A.2. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (03)

Entitas dan Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 28 Tahun 2014 Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM RI.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
2. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
3. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah,

- pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
4. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang pemasyarakatan;
 5. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
 6. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum antara lain :

1. Kesesuaian arah politik legislasi dengan arah pembangunan hukum nasional pada tahap pra legislasi, legislasi dan pasca legislasi
2. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi hukum dan layanan jasa hukum Kementerian Hukum dan HAM
3. Efektifitas penyelenggaraan forum mahkumjakpol baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten kota

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 30 Juni 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan

Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.4. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03).

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) adalah sebagai berikut:

Pendapatan-

- **Pendapatan- LRA**

LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

• **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

o **Aset Lancar**

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
 - Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan

mempertimbangkan jatuh tempo dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.

Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.06/2011 tentang Kualitas Piutang Kementerian Negara/Lembaga dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Persediaan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia mencakup:

- barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, seperti barang habis pakai dan barang tak habis pakai;
 - bahan atau perlengkapan yang akan digunakan dalam proses produksi, contohnya bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku dalam kegiatan pembinaan warga binaan masyarakat;
 - barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam kegiatan operasional.
- Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KU.05.01 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pengukuran nilai persediaan disajikan sebesar:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- Dalam rangka penyajian persediaan di neraca, satuan kerja melaksanakan opname fisik (*stock opname*) persediaan yang dilakukan setiap semester. Berdasarkan hasil opname fisik tersebut, selanjutnya dilakukan penyesuaian data nilai persediaan.

Aset Tetap

- **Aset Tetap**
- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000 (satu juta rupiah);
- Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Kebijakan Penilaian Kembali (Revaluasi) Aset TetapPasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, menyatakan bahwa:
 - Dalam kondisi tertentu, Pengelola Barang dapat melakukan Penilaian kembali atas nilai Barang Milik Negara/Daerah yang telah ditetapkan dalam neraca Pemerintah Pusat/ Daerah.
 - Keputusan mengenai Penilaian kembali atas nilai

Barang Milik Negara dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pemerintah yang berlaku secara nasional.

Dalam rangka mewujudkan penyajian nilai BMN pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang akuntabel sesuai dengan nilai wajarnya, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) BMN berupa aset tetap berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2018 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK06/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan atas BMN berupa :

Aset Tetap:

- a. Tanah,
- b. Gedung dan bangunan, dan
- c. Jalan, Irigasi, dan Jaringan yang meliputi:
 - 1) Jalan dan Jembatan
 - 2) Bangunan Air

Pada Kementerian/Lembaga sesuai dengan kodefikasi BMN yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Selain Aset Tetap tersebut, Penilaian Kembali BMN juga dilaksanakan terhadap Aset Tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan Pemanfaatan (Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga).

Pelaksanaan Penilaian Kembali BMN tersebut dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2017 sampai dengan Tahun Anggaran 2018. Sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S761/MK.06/2018 tanggal 14 September 2018 hal Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara, pelaksanaan Penilaian Kembali BMN dilakukan

setelah pencanangan pada tanggal 29 Agustus 2017.

Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa Tanah dan tanpa survey lapangan untuk objek penilaian selain Tanah.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

a. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat

	(tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**
 - Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
 - Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau

jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (03) sudah mengadakan 4 kali revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) antara lain:

1. Revisi Dipa ke 1 Tanggal : 13 Februari 2023 tentang revisi halaman 3 Dipa ;
2. Revisi Dipa ke 2 Tanggal : 12 April 2023 tentang tentang revisi kegiatan Publikasi Media Online ;
3. Revisi Dipa ke 3 Tanggal : 11 Mei 2023 tentang revisi kegiatan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa;
4. Revisi Dipa ke 4 Tanggal : 07 Juni 2023 tentang perubahan kegiatan sosialisasi layanan ahu;

Hal ini disebabkan oleh adanya adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan anggaran.

Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.260.316.000	2.260.316.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	2.260.316.000	2.260.316.000

Realisasi

Belanja Negara
Rp1.291.590.280,-

B.1 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp1.291.590.280,- atau 57.14% dari anggaran belanja sebesar Rp2.260.316.000,-. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 30 Juni 2023

Uraian	30-Jun-23		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.260.316.000	1.291.590.280	57,14
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	2.260.316.000	1.291.590.280	57,14
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	2.260.316.000	1.291.590.280	57,14

Perbandingan Realisasi Belanja 30 Juni 2023

Dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI 30 JUNI 2023	REALISASI 30 JUNI 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.291.590.280	999.368.325	29,24
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.291.590.280	999.368.325	29,24

Berdasarkan tabel diatas Realisasi Belanja Negara Per Juni 2022 sebesar Rp999.368.325,- dan dibandingkan dengan realisasi per 30 Juni 2023 realisasi belanja negara per Juni 2023 mengalami kenaikan sebesar 29,24 % kenaikan ini disebabkan karena tahun 2023 sudah dicabutnya status pandemi menjadi endemi sehigga situasi sudah mulai normal, kegiatan yang mengumpulkan orang banyak sudah diperbolehkan, perjalanan dinas sudah tidak dibatasi.

Belanja Barang
Rp1.291.590.280,-

B.1.1. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023 dan 31 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.291.590.280,- dan Rp999.368.325,-. Realisasi Belanja Barang per 30 Juni 2023 mengalami kenaikan 29.24% dari Realisasi Belanja Barang TA 30 Juni 2022. Hal ini antara lain disebabkan karena telah dicabutnya status pandemi menjadi endemi yang berdampak tidak adanya pembatasan pada beberapa kegiatan yang terdampak pandemi Covid seperti belanja perjalanan dinas sehingga hal ini berdampak meningkatnya belanja barang non operasional lainnya yaitu belanja bahan bakar kendaraan operasional seperti tahun 2022 dan belanja paket Meeting dalam dan luar kota dan disebabkan karena adanya penambahan kegiatan mendukung tugas dan fungsi Administrasi Hukum Umum di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten.

Perbandingan Belanja Barang 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi	0	0	#DIV/0!
Belanja Bahan	165.708.000	115.907.500	42,97
Belanja Honor Output kegiatan	362.400.000	304.800.000	18,90
Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0		#DIV/0!
Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi	33.000.000	39.851.240	(17,19)
Belanja Langganan Daya Jasa lainnya			#DIV/0!
Belanja Jasa Pos dan Giro			#DIV/0!
Belanja Sewa	-	119.432.535	(100,00)
Belanja Jasa Profesi	25.790.000	50.100.000	(48,52)
Belanja Jasa Lainnya	249.500.000	242.613.170	2,84
Belanja Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Biasa	81.302.280	25.614.900	217,40
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	121.050.000	600.000	20.075,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.350.000		#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota	204.490.000	100.448.980	103,58
Belanja Barang Persediaan	-	-	#DIV/0!
Jumlah Belanja Kotor			-
Pengembalian Belanja			-
Jumlah Belanja	1.291.590.280	999.368.325	29,24

Pada tahun 2023 terdapat belanja penanganan covid yang terdiri dari belanja :

1. Menggunakan akun 521241 (Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi covid 19) yaitu terdapat 1 SPM yaitu :

- SPM No. 00008T/648990/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan nomor SP2D 230201301004167 tanggal 29 Maret 2023 dengan nilai sebesar Rp 33.000.000,- yaitu belanja 750 paket penanganan pencegahan covid 19 seperti vitamin, Susu, Minyak Kayu Putih, CDR

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp100.000.000,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan/ Tambahan Uang Persediaan (UP/TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana kas kecil (UP) yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal neraca.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp100.000.000,- dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022

Keterangan	30-Jun-23	30-Jun-22
Uang Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Jumlah	-	-

Kas Lainnya dan Setara Kas Rp.117.000.000,0,-

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan setara kas per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp117.000.000,- dan 0.

Kas lainnya dan setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas lainnya dan setara kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2023 dan 2022

Keterangan	30-Jun-23	31-Des-22
Kas Lainnya dan setara kas	117.000.000	-
	-	-
Jumlah	117.000.000	-

Terdapat kas lainnya sebesar Rp 117.000.000,- di bendahara pengeluaran yaitu SPM LS Bendahara berupa Perjalanan Dinas yang belum dibagikan pada peserta perjalanan dinas per 30 Juni 2023

Uang Muka dari KPPN Rp100.000.000,-

C.3 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp100.000.000,- dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Saldo Uang Muka Di KPPN mencerminkan jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran.

*Utang kepada
pihak ketiga
Rp117.000.000,
-*

C.4 Utang kepada pihak ketiga

Utang kepada pihak ketiga merupakan hutang yang timbul kepada pihak ketiga karena Perjadin yang belum sempat dibagikan kepada peserta perjalanan dinas oleh bendahara pengeluaran dikarenakan SP2D SPM tersebut tgl 27 Juni 2023 yang keesokan harinya berbarengan dengan cuti bersama hari raya Idul Adha dimana bank tutup pada saat itu sehingga per 30 Juni 2023 masih tercatat utang di neracanya.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Beban Barang

dan Jasa

Rp836.398.000,

-

D.1 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp836.398.000,- dan Rp872.704.445,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Rincian Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2023 dan
30 Juni 2022*

AKUN	URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-23	Pengembalian Belanja	30-Jun-22	Naik / Turun (%)
521131	Beban Barang Operasional- Penanganan	0		0	-
521211	Beban Bahan	165.708.000		115.907.500	42,97
521213	Beban Honor Output Kegiatan	362.400.000		304.800.000	18,90
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0		0	-
521241	Beban Barang Non Operasional- Penanga	33.000.000		39.851.240	(17,19)
522141	Beban Sewa	0		119.432.535	(100,00)
522151	Beban Jasa Profesi	25.790.000		50.100.000	(48,52)
522191	Beban Jasa Lainnya	249.500.000		242.613.170	2,84
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid	0		0	100,00
593111	Beban Persediaan Konsumsi	0		0	100,00
	Jumlah	836.398.000	0	872.704.445	(4,16)

Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 4,16% dibandingkan dengan tahun 2022 hal ini disebabkan antara lain karena :

1. Ada beberapa Kegiatan yang baru akan dilaksanakan di semester II Tahun Anggaran 2023
2. Ada beberapa kegiatan yang sedang proses revisi untuk menyesuaikan kebutuhan yang ada.

tidak terdapat selisih antara belanja barang dan jasa di LRA dan Beban Barang dan Jasa pada LO.

D.2 Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas
Rp364.625.400,
-*

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp364.625.400,- dan Rp346.330.400,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Kenaikan beban perjalanan dinas disebabkan oleh frekuensi rapat koordinasi yang meningkat menjelang akhir tahun. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022

URAIAN JENIS BEBAN	30-Jun-23	Pengembalian Belanja	30-Jun-22
Beban Perjalanan Biasa	81.302.280	0	25.614.900
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	121.050.000	0	600.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	48.350.000	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	204.490.000	0	100.448.980
Jumlah	455.192.280	0	126.663.880

Berdasarkan tabel diatas terdapat kenaikan di Beban Perjalanan Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam kota maupun luarkota hal ini disebabkan oleh sudah tidak adanya pembatasan perjalanan dan

kegiatan yang melibatkan / mengumpulkan orang sudah diperbolehkan dan ada beberapa kegiatan – kegiatan yang tertunda pada saat pandemi baru bisa dilaksanakan saat ini.

tidak terdapat selisih antara belanja perjalanan dinas di LRA dan Beban Perjalanan Dinas pada LO.

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp0,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Defisit LO

(Rp1.291.590.280,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar (Rp1.291.590.280,-) dan (Rp999.368.325,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian

Nilai Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

Selisih

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Revaluasi Aset Tetap Rp0

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 30 Juni 2023

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Peralatan dan Mesin	
Gedung dan Bangunan	
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Beban	
Koreksi Pendapatan	
Koreksi Piutang	
Koreksi Kewajiban	
Koreksi Hibah	
Jumlah	-

Transaksi

Antar Entitas

Rp1.291.590.280,

-

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.291.590.280,- dan Rp999.368.325,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.291.590.280
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	1.291.590.280

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2023, DDEL sebesar Rp0 sedangkan DKEL sebesar Rp1.291.590.280,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp0,- terdiri dari:

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1	-	-	-
	Jumlah		-

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp0.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang tahun 2023. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 adalah Rp0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1			
2			
Total Pengesahan			Rp -
Pengesahan Pengembalian Hibah			Rp -
Jumlah			Rp -

Ekuitas Akhir

Rp0,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 30 Juni 2023 dan 30 Juni 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- .



LAMPIRAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

- A. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA (Jika Ada)
B. REKENING YANG DIGUNAKAN OLEH BENDAHARA PENGELUARAN

Nomor Rekening : 650896489901000

Nama Rekening : BPG020 KNWL HUKUM DAN HAM BANTEN
648990

Nama Bank : BRI CABANG SERANG

Surat Izin : S-1063/WPB.12/KP.05/2020

Tanggal : 08 Juni 2021

- C. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-14 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM/Penguji SPP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2023, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 :

KPA : Tejo Harwanto

PPK : Agus Suryana

Tetapi kemudian ada pergantian PPK berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-14 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM/Penguji SPP), Pejabat Pengelola Administrasi Belanja Pegawai di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2023, Pejabat Pembuat Komitmen An. Emiel Amarulla pada tanggal 01 Maret 2023 dan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.KU.03.03-01 Tahun 2023 pada tanggal 01 Januari 2023 Tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran :

Bendahara : Hafin Jaya Wardana

D. Realisasi Anggaran periode Januari s.d Juni Tahun Anggaran 2023 sebesar 50.85%. Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut (*diisi dengan pelaksanaan kegiatan yang berdampak signifikan terhadap realisasi*):

No.	Nama Kegiatan	Realisasi (%)
1	Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait	35.68 %
2	Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	78.25 %
3	Penanganan perkara pada kantor wilayah	-
4	Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah	36.82 %
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah		50.85 %

Tidak terdapat kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Juni 2023 ini

E. Capaian Nilai IKPA berdasarkan Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN):

Pada bulan Juni 2023 nilai IKPA Kanwil Banten 648990 sebesar 100 %.

F. Per Juni 2023, nilai indikator kinerja detail capaian RO Kanwil Kumham Banten 648990 sebagai berikut :

NO	Klasifikasi Rincian Output	Klasifikasi Rincian Output	Target PCRO	Persentase Capaian RO	Realisasi Volume RO	Progres Capaian RO
1	5251.AEA. Koordinasi	001 - Koordinasi Divyankum dengan instansi terkait	15	15	9.5	65 %

	Klasifikasi Rincian Output	Klasifikasi Rincian Output	Target PCRO	Persentase Capaian RO	Realisasi Volume RO	Progres Capaian RO
2	5251. BAH. Pekayanan Publik Lainnya	001 - Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	4	4	2	75%
3	5251. BCB. Perkara Hukum Lembaga	001 - Penanganan perkara pada kantor wilayah	1	1	1	58%
4	5251. BIC. Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	001 - Pengawasan kenotariatan pada Majelis Pengawas di Wilayah	8	8	6	51%

G. Pada tahun 2023 terdapat belanja penanganan covid yang terdiri dari belanja :

Menggunakan akun 521241 (Belanja Barang Non Operasional – Penanganan Pandemi covid 19) yaitu terdapat 1 SPM yaitu :

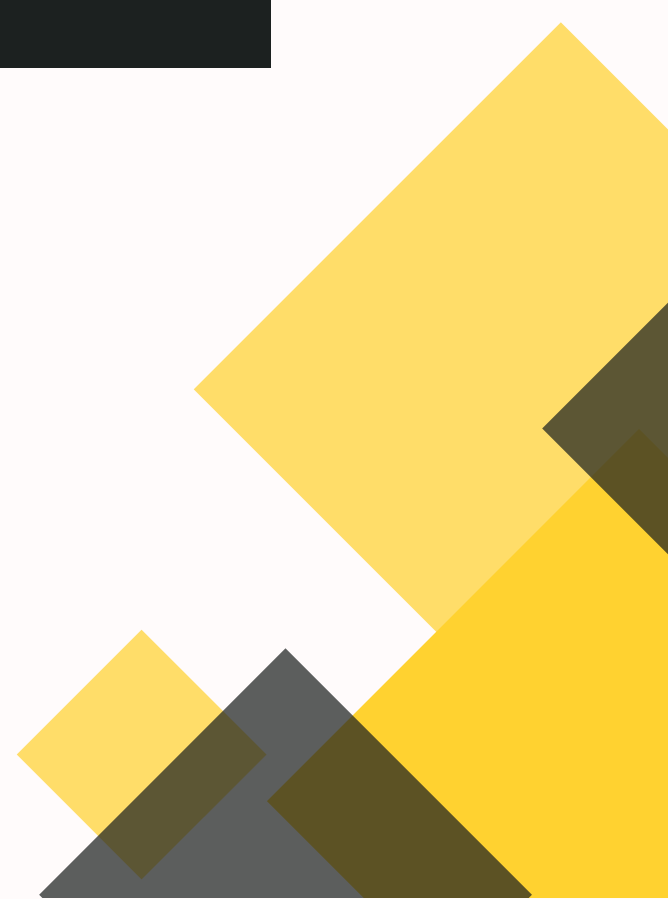
SPM No. 00008T/648990/2023 tanggal 28 Maret 2023 dengan nomor SP2D 230201301004167 tanggal 29 Maret 2023 dengan nilai sebesar Rp 33.000.000,- yaitu belanja 750 paket penanganan pencegahan covid 19 seperti vitamin, Susu, Minyak Kayu Putih, CDR



LAPORAN KEUANGAN

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM BANTEN
(11/648997)**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2023



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

JL. KH SYAM'UN NO. 44D SERANG
TELEPON 0254. 223104, 0254 217029 FAXIMILE 0254 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) per 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp219.371.000,- atau mencapai 100 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp219.371.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah

sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp219.371.000,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp219.371.000,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp 219.371.000,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp219.371.000,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp219.371.000,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.11) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	219.371.000	219.371.000	100,00	180.218.000
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		219.371.000	219.371.000	100,00	180.218.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.11)
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
ASET			-
ASET LANCAR			-
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang yang belum ditagihkan	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.11)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	97.621.000	73.888.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	121.750.000	106.330.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		219.371.000	180.218.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(219.371.000)	(180.218.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(219.371.000)	(180.218.000)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(219.371.000)	(180.218.000)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.11)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31
DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(219.371.000)	(180.218.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	219.371.000	180.218.000
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11)

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.11) berkedudukan di Serang-Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Jalan KH Syam'un NO. 44 D Serang, Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) mempunyai

tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yaitu dalam tahapan legislasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 September 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 September 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

• **Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

• **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui

sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**
 - Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
 - Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai

nominal.

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan	100%

	pelunasan	
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan

atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan

dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5

Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

- a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

• **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.11) melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-013.11.2.648997/2024 tanggal 24 November 2023. Satker 648997 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat perubahan DIPA. Sehingga berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja untuk DIPA 648997 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	219.371.000	219.371.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	219.371.000	219.371.000

Realisasi

B.1 Pendapatan

Pendapatan Rp0,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-. Tidak terdapat realisasi pendapatan pada (013.11).

Realisasi

B.2 Belanja

Belanja

Negara

Rp219.371.000,-

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp219.371.000,- atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp219.371.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2022 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	219.371.000	219.371.000	100,00
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	219.371.000	219.371.000	100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	219.371.000	219.371.000	100,00

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 21,73% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	219.371.000	180.218.000	21,73
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	219.371.000	180.218.000	21,73

*Belanja
Pegawai
Rp0,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran Belanja Pegawai baik di TA 2023 atau TA 2022.

Belanja

Barang

Rp219.371.000,-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp219.371.000,- dan Rp180.218.000. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 21,73% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang non operasional sebesar 50,49%, belanja jasa sebesar 80%,07, dan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 14,50% pada TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	1.500.000	15.980.000	(90,61)
Belanja Barang Non Operasional	41.471.000	27.558.000	50,49
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi	-	-	-
Belanja Jasa	54.650.000	30.350.000	80,07
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	121.750.000	106.330.000	14,50
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Belanja Persediaan Konsumsi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	219.371.000	180.218.000	21,73
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	219.371.000	180.218.000	21,73

Belanja

Modal Rp 0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal pada TA 2023 dan 2022.

Belanja

Modal Tanah

Rp 0,-

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah baik di TA 2023 atau TA 2022.

Belanja

Modal

Peralatan

dan Mesin

Rp 0,-

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2023 dan 2022.

Belanja

Modal

Gedung dan

Bangunan

Rp 0,-

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023.

Belanja

Modal Jalan,

Irigasi, dan

Jaringan

Rp 0,-

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2023.

Belanja

Modal

Lainnya

Rp 0,-

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi Belanja modal lainnya pada 31

Desember 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 31 Desember 2022 hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal tahun 2023 dan 2022.

*Belanja
Bantuan
Sosial
Rp 0,-*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial pada TA 2023 ini.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan
Pajak
Rp0,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

*Persediaan
Rp0,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tidak terdapat Persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Tuntutan
Penjualan
Angsuran
Rp0,-*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan

Rp0,- Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah **C.14 Tanah**

Rp0,- Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.

Peralatan dan **C.15 Peralatan dan Mesin**

Mesin
Rp0,- Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. tidak terdapat aset berupa peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan.

Gedung dan **C.16 Gedung dan Bangunan**

Bangunan
Rp0,- Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.

Jalan, Jaringan **C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

dan Irigasi
Rp0,- Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

Aset Tetap **C.18 Aset Tetap Lainnya**

Lainnya Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat

Rp0,-

dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

Konstruksi

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Dalam

Pengerjaan

Rp0,-

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0,- yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

Akumulasi

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan

Aset Tetap

Rp0,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Peralatan dan Mesin. Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2023.

Aset Tak

C.21 Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp0,-

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) berupa *software* yang

digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

*Aset Lain-Lain
Rp0,-*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Yang
Belum
Ditagihkan
Rp0,-*

C.25 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan tagihan yang sudah diinput dalam bentuk Surat Perintah Bayar namun belum selesai diproses hingga SP2D

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp0,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih

antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Pendapatan PNB pada saat tanggal pelaporan.

Beban Pegawai

Rp0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

Beban Persediaan

Rp0,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tidak terdapat Beban persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp97.621.000,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp97.621.000,- dan Rp73.888.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

*Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember
2023*

URAIAN JENIS BEBAN	31-Dec-23	PENGEMBALIAN BELANJA	31-Dec-22
Beban Barang Operasional	-	-	-
Beban Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid 19	1.500.000		15.980.000
Beban Bahan	41.471.000	-	27.558.000
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Penanganan Pandemi	-	-	-
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	54.650.000	-	29.500.000
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid 19		-	850.000
JUMLAH	97.621.000	-	73.888.000

*Beban
Pemeliharaan
Rp0,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi

normal.

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Perjalanan Dinas
Rp121.750.000,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp 121.750.000,- dan Rp 106.330.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	Pengembalian Belanja	TH 2022
Beban Perjalanan Biasa	88.600.000	-	85.480.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.150.000	-	20.850.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	121.750.000	-	106.330.000

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0,-*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk

mencapai tujuan entitas.

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Bantuan Sosial
Rp0,-*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp0,-*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada saat tanggal pelaporan.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih
Rp0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan

*Beban Lain-lain
Rp0,-*

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2023.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional
Rp0,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

*Pos Luar Biasa
Rp0,-*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal

Rp0,-

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- .

E.2 Surplus (Defisit) LO

Defisit LO

Rp219.371.000,-

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp219.371.000,- dan Rp180.218.000,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,-

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,-

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada tanggal pelaporan.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,-*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi pada tanggal pelaporan.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

*Transaksi Antar
Entitas Rp Rp
Rp219.371.000,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp219.371.000,- dan Rp180.218.000,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	219.371.000
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	219.371.000

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp0,- sedangkan DKEL sebesar Rp 219.371.000,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2023. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0,-. Tidak terdapat pengesahan Hibah untuk tahun 2023 dan 2022.

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Rp0,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 653206489971000
Nama Rekening : BPG 020 KNWL HUKUM DAN
HAM BANTEN 648997
Nama Bank : BRI CABANG SERANG
Surat Izin : S-1247/WPB.12/KP.05/2020
Tanggal : 25-06-2020

2. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W12.70.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Perubahan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W12.14.KU.03.03 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Dan Pegawai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Ham Banten TA 2023, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 :

KPA : Dodot Adikoeswanto
PPK : Emiel Amarulla
Bendahara : Hafin Jaya Wardana

3. Pada Semester II Tahun 2023 tidak terdapat realisasi akun Covid 19, namun pada semester I terdapat realisasi akun 521131 Beban Barang Penanganan

Pandemi Covid 19

F.3 TEMUAN

Di triwulan III Tahun 2023 tidak terdapat temuan.



LAMPIRAN

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM BANTEN
648997

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM 11
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648997

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 10:11 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	219,371,000	219,371,000	0	100	180,218,000	180,218,000	0	100
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	219,371,000	219,371,000	0	100	180,218,000	180,218,000	0	100
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM 11
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648997

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 10:11 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	219,371,000	219,371,000	0	100	180,218,000	180,218,000	0	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

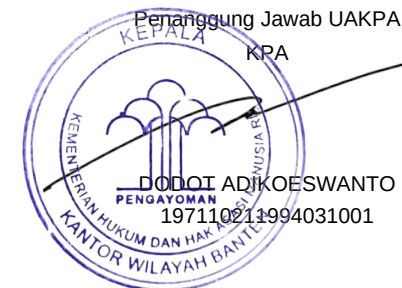
Keterangan :

FINAL

Serang, 25 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 11
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 648997
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 25/01/24 10:12 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	18,000,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	18,000,000	1,500,000	1,500,000	0	1,500,000	100	0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	39,971,000	41,471,000	41,471,000	0	41,471,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	39,971,000	41,471,000	41,471,000	0	41,471,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	42,700,000	54,650,000	54,650,000	0	54,650,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	42,700,000	54,650,000	54,650,000	0	54,650,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	85,550,000	88,600,000	88,600,000	0	88,600,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,150,000	33,150,000	33,150,000	0	33,150,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	118,700,000	121,750,000	121,750,000	0	121,750,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	219,371,000	219,371,000	219,371,000	0	219,371,000	100	0
	JUMLAH BELANJA	219,371,000	219,371,000	219,371,000	0	219,371,000	100	0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648997) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 10:11 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	

Keterangan :
FINAL

Serang, 25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KRA
DOKTOR ADIKOESWANTO
197110211994031001

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1 JANUARI 2023 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 11
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 648997

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM
BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl. Cetak 25/01/2024 10:12 AM
lap_neraca_percobaan_sawal_akrual_satker --rekon17

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648997) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 10:11 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	219,371,000
3.0	521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,500,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	41,471,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	54,650,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	88,600,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,150,000	0
JUMLAH			219,371,000	219,371,000

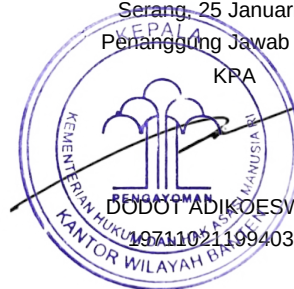
Keterangan :

FINAL

Serang, 25 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



DODOT ADIKOESWANTO

197410211994031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648997) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 10:12 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	219,371,000
3.0	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	1,500,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	41,471,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	54,650,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	88,600,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,150,000	0
JUMLAH			219,371,000	219,371,000

Keterangan :

FINAL



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648997) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 10:11 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	97,621,000	73,888,000	23,733,000	32.12
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	121,750,000	106,330,000	15,420,000	14.502
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648997) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 10:11 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	219,371,000	180,218,000	39,153,000	21.725
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(219,371,000)	(180,218,000)	(39,153,000)	21.725
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(219,371,000)	(180,218,000)	(39,153,000)	21.725
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(219,371,000)	(180,218,000)	(39,153,000)	21.725

Keterangan :
FINAL

Serang, 25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (11) BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648997) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 10:11 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(219,371,000)	(180,218,000)	(39,153,000)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	219,371,000	180,218,000	39,153,000	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	-
EKUITAS AKHIR	0	0	0	-

Keterangan :

FINAL

Serang, 25 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



DODOT ADIKOESWANTO

197110211994031001



BerAKHLAK
BERAKHLAK MELAYANI MASYARAKAT

**#bangga
melayani
bangsa**



**REFORMASI
HUKUM**

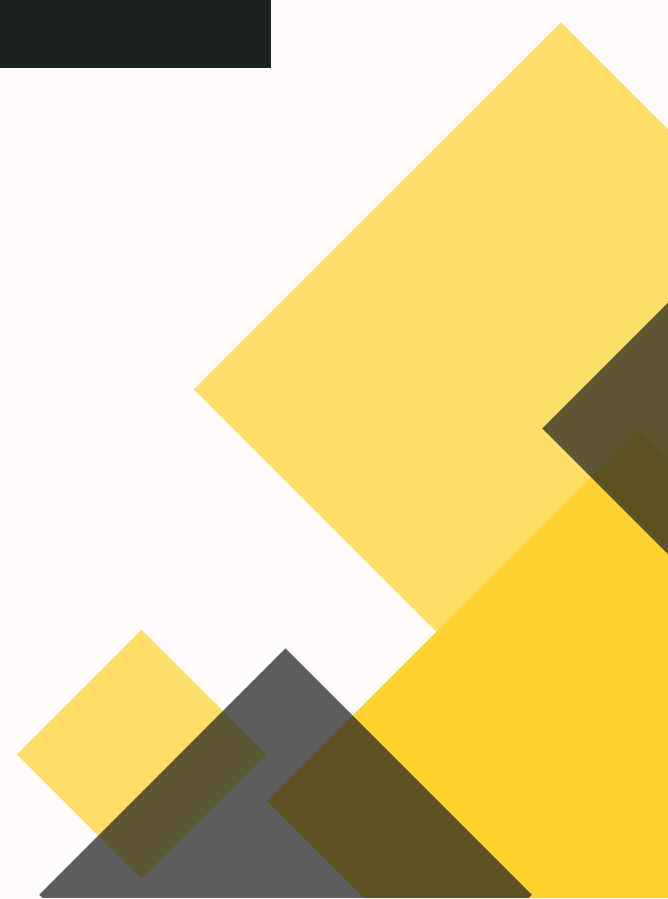
PEMAJUAN
HAK ASASI MANUSIA



LAPORAN KEUANGAN

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM BANTEN
(10/648996)**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2023



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	36
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

JL. KH SYAM'UN NO. 44D SERANG
TELEPON 0245. 223104, 0254 217029 FAXIMILE 0254 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP 197110211994031001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) per 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.502.681.000,- atau mencapai 99,67 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp2.511.020.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah

sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp2.502.681.000,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp2.502.681.000,-, Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp2.502.681.000,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp2.502.681.000,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.502.681.000,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.10) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	2.511.020.000	2.502.681.000	99,67	1.386.020.987
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		2.511.020.000	2.502.681.000	99,67	1.386.020.987

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.10) NERACA

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.10)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN
31 DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	2.126.970.000	1.421.273.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	375.711.000	293.312.949
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		2.502.681.000	1.714.585.949
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(2.502.681.000)	(1.714.585.949)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(2.502.681.000)	(1.714.585.949)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(2.502.681.000)	(1.714.585.949)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.10)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31
DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(2.502.681.000)	(1.714.585.949)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	2.502.681.000	1.714.585.949
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10)

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.10) berkedudukan di Serang-Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Bedasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Jalan KH Syam'un NO. 44 D Serang, Banten.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) mempunyai

tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Rencana strategis Badan Pembinaan Hukum Nasional pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yaitu dalam tahapan legislasi. Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki kewenangan yang cukup besar dalam dua lingkup yakni tahap pra legislasi dan pasca legislasi. Perencanaan hukum dilakukan melalui kegiatan :

1. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional.
2. Penyusunan Program Legislasi Nasional usulan Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.
3. Monitoring dan Evaluasi penyusunan Program Legislasi Nasional usul Pemerintah, Program Pembentukan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 30 September 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual

(SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya

ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 30 September 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

• Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto,

dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

- **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang

tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di

neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%

Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan

atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat

dari suatu aset tetap.

- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

- **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-013.10.2.648996/2024 tanggal 24 November 2024. Satker 648996 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 terdapat revisi, sehingga berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja untuk DIPA 648996 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	2.344.210.000	2.511.020.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Jumlah Belanja	2.344.210.000	2.511.020.000

Pada tahun 2023 Kantor Wilayah Banten DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan realokasi anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, anggaran semula sebesar Rp9.900.000,- menjadi sebesar Rp0,- Rincian realokasi anggaran tersebut adalah sebagai berikut:

Akun	Uraian	2023	
		ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9.900.000	-
	Jumlah Belanja	9.900.000	0

Realisasi**Pendapatan****Rp0,-****B.1 Pendapatan**

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0. Tidak terdapat realisasi pendapatan pada (013.10).

Realisasi**Belanja****Negara****Rp2.502.681.000,-****B.2 Belanja**

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.502.681.000,- atau 99,67% dari anggaran belanja sebesar Rp2.511.020.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.511.020.000	2.502.681.000	99,67
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	2.511.020.000	2.502.681.000	99,67
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	2.511.020.000	2.502.681.000	99,67

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 45,96% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	2.502.681.000	1.714.585.949	45,96
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	2.502.681.000	1.714.585.949	45,96

Di TA 2023 terdapat penambahan pagu anggaran Bantuan Hukum pada 4841.QBA. sebesar Rp121.000.000 sehingga realisasi Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dengan pagu sebesar Rp1.697.000.000,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2023

yaitu sebesar Rp1.693.000.000,- atau sebesar 99,76%. Serta penambahan pagu anggaran pada 4841.QBC Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi sebesar Rp45.810.000,- sehingga realisasi Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi dengan pagu sebesar Rp291.220.000,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp287.110.000 ,- atau sebesar 98,59%.

*Belanja
Pegawai
Rp0,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran Belanja Pegawai baik di TA 2023 atau TA 2022.

*Belanja
Barang
Rp2.502.681.000,-*

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp Rp2.502.681.000,-,- dan Rp1.714.585.949,-. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 45,54% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	-	39.945.000	(100,00)
Belanja Barang Non Operasional	126.160.000	1.370.808.000	(90,80)
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi	-	-	-
Belanja Jasa	2.000.810.000	15.520.000	12.791,82
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	375.711.000	293.312.949	28,09
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Belanja Persediaan Konsumsi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	2.502.681.000	1.719.585.949	45,54
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	2.502.681.000	1.719.585.949	45,54

Pada tahun 2023 tidak terdapat pengembalian.

Pada Kantor Wilayah Banten DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat anggaran Bantuan Hukum (Bankum) dimana pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum terdiri dari Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi) dan Layanan Bantuan Hukum Kel. Masyarakat (Non Litigasi) yang dibiayai dengan menggunakan akun belanja barang non operasional (521219). Realisasi Bantuan Hukum periode 31 Desember 2023 sebesar Rp1.938.410.000,- atau 99,59% dari Anggaran sebesar Rp1.942.410.000,- dengan rincian sebagai berikut:

KODE	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI ANGGARAN
4841.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (Litigasi)	1.697.000.000	1.693.000.000	99,76%
4841.QBC	Layanan Bantuan Hukum Kel. Masyarakat (non Litigasi)	291.220.000	287.110.000	98,59%
Jumlah	Jumlah	1.942.410.000	1.938.410.000	99,59%

Pada Kantor Wilayah Banten DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional mengalokasikan belanja barang penanganan pandemi COVID-19 sebesar Rp9.900.000,-. Anggaran tersebut belum terealisasi sebesar Rp0,- atau 0% dan sudah dilakukan revisi ke akun belanja bahan (521211) .

*Perbandingan Belanja Barang-Penanganan Pandemi COVID-19
Periode 31 Desember 2023 dan 2022*

KODE	URAIAN	REALISASI 2023	REALISASI 2022	NAIK (TURUN) %
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	-	39.945.000	-100,00
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-	4.320.000	
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	
Jumlah Belanja Kotor		-	44.265.000	-100,00
Pengembalian		-	-	
Jumlah Belanja		-	44.265.000	-100,00

Realisasi belanja barang Penanganan Pandemi COVID-19 periode 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar -100% dari TA 2022. Hal ini antara lain disebabkan karena penurunan angka kasus aktif COVID-19 dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat sudah tidak diberlakukan sehingga mengurangi jumlah belanja barang, selain itu belum dilaksanakannya kegiatan sesuai dengan akun tersebut.

Belanja

Modal Rp 0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal Kanwil Banten pada TA 2023 Tidak ada.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2023 tidak mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat belanja modal pada TA 2023 dan TA 2022.

Belanja

B.5.1 Belanja Modal Tanah

*Modal Tanah
Rp 0,-*

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi tersebut pada TA 2023 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah baik di TA 2023 atau TA 2022.

*Belanja
Modal
Peralatan
dan Mesin
Rp 0,-*

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-, tidak mengalami kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2023 dan 2022.

*Belanja
Modal
Gedung dan
Bangunan
Rp 0,-*

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023.

*Belanja
Modal Jalan,
Irigasi dan
Jaringan Rp
0,-*

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2023.

*Belanja
Modal
Lainnya
Rp 0,-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal Kanwil Banten pada TA 2023 tidak ada.

Realisasi Belanja modal lainnya pada 31 Desember 2023

mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2022, hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal di TA 2023 dan TA 2022.

*Belanja
Bantuan
Sosial Rp 0,-*

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial pada TA 2023 ini.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan
Pajak
Rp0,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp0,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

*Persediaan
Rp0,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau

perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Tuntutan
Penjualan
Angsuran
Rp0,-*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan

estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah

C.14 Tanah

Rp0,-

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.

Peralatan dan

C.15 Peralatan dan Mesin

Mesin

Rp0,-

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat aset berupa peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan.

Gedung dan

C.16 Gedung dan Bangunan

Bangunan

Rp0,-

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.

Jalan, Jaringan

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

dan Irigasi

Rp0,-

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

Aset Tetap

C.18 Aset Tetap Lainnya

Lainnya

Rp0,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat pembelian Aset tetap Lainnya pada TA 2023 ini.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Peralatan dan Mesin. Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

*Aset Tak
Berwujud Rp0,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak

terdapat transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

*Aset Lain-Lain
Rp0,-*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp0,-*

C.25 Utang Kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang yang belum ditagihkan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,- merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp0,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan

Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Pendapatan PNPB pada saat tanggal pelaporan.

Beban Pegawai
Rp0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

Beban Persediaan
Rp0,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada *Rincian Beban Pegawai* 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tidak terdapat Beban persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp2.126.970.000,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.126.970.000,- dan Rp 1.421.273.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	PENGEMBALIAN BELANJA	TH 2022
Beban Barang Operasional	-	-	39.945.000
Beban Bahan	118.510.000	-	86.228.000
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Lainnya	7.650.000	-	1.279.580.000
Beban Barang Non Operasional Penanganan Pandemi	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	1.980.110.000	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	20.700.000	-	11.200.000
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	4.320.000
JUMLAH	2.126.970.000	-	1.421.273.000
Jumlah Beban Barang dan Jasa		2.126.970.000	

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban
Pemeliharaan
Rp0,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja

Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Perjalanan
Dinas
Rp375.711.000,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp375.711.000,- dan Rp293.312.949,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	PENGEMBA LIAN	TH 2022
Beban Perjalanan Biasa	315.461.000		232.912.949
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	60.250.000	-	60.400.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-		
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	375.711.000	-	293.312.949

Beban perjalanan Biasa (524111) merupakan perjalanan dinas ke 8 Kabupaten dan Kota di seluruh Wilayah Banten.

Beban Perjalanan Dinas Dalam kota (524113) merupakan perjalanan dalam kota untuk kegiatan dan monev bantuan hukum.

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Rp0,-

adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Bantuan Sosial Rp0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada

saat tanggal pelaporan.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan

*Beban Lain-lain
Rp0,-*

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2022.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

*Pos Luar Biasa
Rp0,-*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak

terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2022.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Defisit LO

Rp2.502.681.000,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.502.681.000,- dan Rp1.714.585.949,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada tanggal pelaporan.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap
Rp0,-*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi pada tanggal pelaporan.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp2.502.681.000,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp2.502.681.000,- dan Rp 1.714.585.949,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.502.681.000
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	2.502.681.000

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp0,- sedangkan DKEL sebesar Rp2.502.681.000,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-.

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-.

dari total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2022. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0,-. Tidak terdapat pengesahan Hibah untuk tahun 2023 dan 2022.

Ekuitas Akhir

E.5 Ekuitas Akhir

Rp0,-

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 653576489961000
Nama Rekening : BPG 020 KNWL HUKUM DAN
HAM BANTEN 648996
Nama Bank : BRI CABANG SERANG
Surat Izin : S-1214/WPB.12/KP.05/2021
Tanggal : 23-07-2020

2. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W.12.411.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12.70.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pegawai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2023, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 :

KPA : Dodot Adikoeswanto
PPK : Emiel Amarulla
Bendahara : Hafin Jaya Wardana

3. Di TA 2023 ini terdapat Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid 19 (522192) dengan nilai total sebesar

Rp9.900.000,- namun kegiatan belum terealisasi dan sudah dilakukan revisi ke akun Belanja Jasa Lainnya (522191) dan kemudian direvisi ke akun Belanja Bahan (521211) sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 Hal Penggunaan Akun Khusus Covid.

4. Di TA 2023 ini terdapat penambahan pagu sebesar Rp121.000.000,- pada 4841.QBA Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi, sehingga realisasi anggaran Bantuan Hukum pada 4841.QBA Kegiatan Bantuan Hukum Litigasi dengan pagu sebesar Rp1.697.000.000,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp1.693.000.000,- atau sebesar 99,76%. Serta penambahan pagu anggaran sebesar Rp45.810.000,- pada 4841.QBC Kegiatan Bantuan Hukum Non Litigasi dengan sehingga pagu sebesar Rp291.220.000,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp287.110.000,- atau sebesar 98,59%..

F.3 TINDAK LANJUT TEMUAN

Di TA 2023 ini tidak terdapat temuan.



LAMPIRAN

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM BANTEN
648996

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 10
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648996

Tgl Data : 24/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 24/01/24 3:16 PM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	2,511,020,000	2,502,681,000	(8,339,000)	100	1,725,866,000	1,714,585,949	(11,280,051)	99
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	2,511,020,000	2,502,681,000	(8,339,000)	100	1,725,866,000	1,714,585,949	(11,280,051)	99
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 10
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648996

Tgl Data : 24/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 24/01/24 3:16 PM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	2,511,020,000	2,502,681,000	(8,339,000)	100	1,725,866,000	1,714,585,949	(11,280,051)	99
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

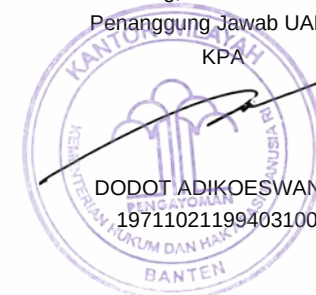
Keterangan :

FINAL

Serang, 24 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 648996
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 24/01/24 3:56 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 24/1/24 2:42 PM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	109,539,000	118,510,000	118,510,000	0	118,510,000	100	0
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	53,851,000	7,650,000	7,650,000	0	7,650,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	163,390,000	126,160,000	126,160,000	0	126,160,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,821,410,000	1,988,220,000	1,980,110,000	0	1,980,110,000	99.59	8,110,000
522151	Belanja Jasa Profesi	16,600,000	20,700,000	20,700,000	0	20,700,000	100	0
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9,900,000	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,847,910,000	2,008,920,000	2,000,810,000	0	2,000,810,000	99.6	8,110,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	312,810,000	315,690,000	315,461,000	0	315,461,000	99.93	229,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,100,000	60,250,000	60,250,000	0	60,250,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	332,910,000	375,940,000	375,711,000	0	375,711,000	99.94	229,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	2,344,210,000	2,511,020,000	2,502,681,000	0	2,502,681,000	99.67	8,339,000
	JUMLAH BELANJA	2,344,210,000	2,511,020,000	2,502,681,000	0	2,502,681,000	99.67	8,339,000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA DALAM RANGKA COVID-19
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10
WILAYAH/PROVINSI : null
SATUAN KERJA : 648996
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
BA(013) ES1(10) BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 24/01/24 9:18 PM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_covid --rekon17
 Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5221	Belanja Jasa							
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	9,900,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	9,900,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	9,900,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH BELANJA	9,900,000	0	0	0	0		0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648996) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 24/01/24 12:00 PM
Tgl Cetak : 24/01/24 3:29 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	

Keterangan :
FINAL

Serang, 24 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA

DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648996) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 24/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 24/01/24 3:29 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	2,502,681,000
3.0	521211	Belanja Bahan	118,510,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	7,650,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	1,980,110,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	20,700,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	315,461,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	60,250,000	0
JUMLAH			2,502,681,000	2,502,681,000

Keterangan :

FINAL

Serang, 24 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



DODOT ADIKOESWANTO

197110211994031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648996) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 24/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 24/01/24 3:29 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	2,502,681,000
3.0	521211	Beban Bahan	118,510,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	7,650,000	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	1,980,110,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	20,700,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	315,461,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	60,250,000	0
JUMLAH			2,502,681,000	2,502,681,000

Keterangan :

FINAL

Serang, 24 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA

DODOT ADIKOESWANTO

197110211994031001



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648996) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 24/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 24/01/24 3:44 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	2,126,970,000	1,421,273,000	705,697,000	49.652
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	375,711,000	293,312,949	82,398,051	28.092
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648996) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 24/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 24/01/24 3:44 PM

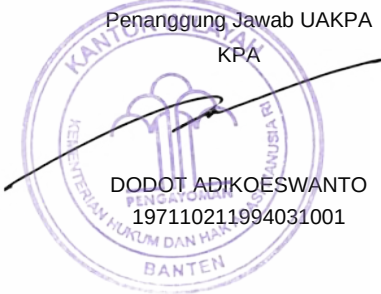
Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	2,502,681,000	1,714,585,949	788,095,051	45.964
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(2,502,681,000)	(1,714,585,949)	(788,095,051)	45.964
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(2,502,681,000)	(1,714,585,949)	(788,095,051)	45.964
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(2,502,681,000)	(1,714,585,949)	(788,095,051)	45.964

Keterangan :
FINAL

Serang, 24 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA



DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648996) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 24/01/24 12:00 PM

Tgl Cetak : 24/01/24 3:46 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(2,502,681,000)	(1,714,585,949)	(788,095,051)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	2,502,681,000	1,714,585,949	788,095,051	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	-
EKUITAS AKHIR	0	0	0	-

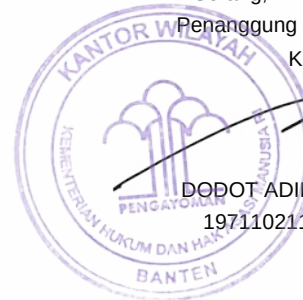
Keterangan :

FINAL

Serang, 24 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001





LAPORAN KEUANGAN

**KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM BANTEN
(09/648995)**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2023

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dodot Adikuswanto
NIP. 197110211994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	23
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	28
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	37
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Trwilulan III Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,


Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) per 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp235.483.350,- atau mencapai 100% persen dari alokasi anggaran sebesar Rp235.484.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas per 31 Desember 2023. Nilai Aset per per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,-; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0,-; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah

sebesar Rp0,-, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp235.483.350,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp235.483.350,-. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0,- dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp235.483.350,-.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar Rp235.483.350,- ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp235.483.350,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.09) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-		-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-		-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-		-
Belanja Barang	B.4	235.484.000	235.483.350	100,00	224.982.000
Belanja Modal	B.5	-	-		-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		235.484.000	235.483.350	100,00	224.982.000

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.09)
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.09)
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.09)
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31
DESEMBER 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	97.284.350	128.413.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	138.199.000	96.569.000
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		235.483.350	224.982.000
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(235.483.350)	(224.982.000)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(235.483.350)	(224.982.000)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNBP		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(235.483.350)	(224.982.000)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN
(013.09)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(235.483.350)	(224.982.000)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.1	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	235.483.350	224.982.000
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah

Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09)

<i>Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Banten (013.09) berkedudukan di Serang-Banten. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Bedasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I. Entitas berkedudukan di Jalan KH Syam'un NO. 44 D Serang, Banten.Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) mempunyai

tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Rencana strategis Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten yaitu dalam tahapan legislasi.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar

Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

• **Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan- LO

- **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - o Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - o Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - o Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

- **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

- a. **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua	50%

	tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

- **Kewajiban**

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

• **Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: DIPA-013.09.2.648995/2024 tanggal 24 November 2023. Satker 648995 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 tidak terdapat perubahan DIPA. Sehingga berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja untuk DIPA 648995 bisa dilihat pada tabel dibawah ini :

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	235.484.000	235.484.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	235.484.000	235.484.000

Realisasi

Pendapatan

Rp0,-

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-. Tidak terdapat realisasi pendapatan pada (013.09).

Realisasi

Belanja

Negara

Rp235.483.350,-

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp235.483.350,- atau 100% dari anggaran belanja sebesar Rp235.484.000,- Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023

Uraian	2023		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	
Belanja Barang	235.484.000	235.483.350	100,00
Belanja Modal	-	-	
Belanja Bantuan Sosial	-	-	
Total Belanja Kotor	235.484.000	235.483.350	100,00
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	235.484.000	235.483.350	100,00

Dibandingkan dengan TA 2022, Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,67% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh naiknya besaran anggaran pada DIPA 648995 dari tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	235.483.350	224.982.000	4,67
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	235.483.350	224.982.000	4,67

*Belanja
Pegawai
Rp0,-,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja per 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dari TA 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran Belanja Pegawai baik di TA 2023 atau TA 2022.

Belanja

Barang

Rp235.483.350,-

-

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp235.483.350,- dan Rp224.982.000,-. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 4,67% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh kenaikan belanja barang non operasional sebesar 41,49%, belanja jasa sebesar 12,84%, dan belanja perjalanan dalam negeri sebesar 43,11% pada TA 2023.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI TA 2023	REALISASI TA 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	-	56.732.000	-
Belanja Barang Non Operasional	80.984.350	57.236.000	41,49
Belanja Barang Persediaan Penanganan Pandemi	-	-	-
Belanja Jasa	16.300.000	14.445.000	12,84
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	138.199.000	96.569.000	43,11
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Belanja Persediaan Konsumsi	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	235.483.350	224.982.000	4,67
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	235.483.350	224.982.000	4,67

Belanja

Modal Rp 0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal pada TA 2023 dan 2022.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Realisasi tersebut pada TA 2022 tidak mengalami kenaikan atau penurunan dibandingkan TA 2022. Hal ini disebabkan tidak ada anggaran belanja modal tanah baik di TA 2023 atau TA 2022.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- tidak mengalami kenaikan maupun penurunan bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan karena tidak adanya anggaran belanja Modal Peralatan dan Mesin di Tahun 2023 dan 2022.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada TA 2023.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2023.

*Belanja
Modal Rp 0,-*

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Realisasi Belanja modal lainnya pada 31 Desember 2023 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan

dibandingkan 31 Desember 2022 hal ini disebabkan karena tidak ada belanja modal tahun 2022 dan 2023.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial pada TA 2023 ini.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo kas di bendahara penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada

tanggal pelaporan.

*Piutang Bukan
Pajak
Rp0,-,-*

C.4 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang PNBPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
Tagihan
TP/TGR
Rp0,-,-*

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak Terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0,-,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp0,-,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

*Belanja
Dibayar di
Muka
Rp0,-,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

*Persediaan
Rp0,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember

2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tidak terdapat Persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Tuntutan
Penjualan
Angsuran
Rp0,-*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp0,-*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.08) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.

*Peralatan dan
Mesin
Rp0,-*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. tidak terdapat aset berupa peralatan dan mesin pada tanggal pelaporan.

*Gedung dan
Bangunan
Rp0,-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.

*Jalan,Jaringan
dan Irigasi
Rp0,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar

Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0,-,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,-,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-
Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Peralatan dan Mesin. Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023.

Aset Tak

C.21 Aset Tak Berwujud

Berwujud Rp0,-

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.10) berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan.

Aset Lain-Lain

C.22 Aset Lain-Lain

Rp0,-

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

Akumulasi

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Penyusutan

dan Amortisasi

Aset Lainnya

Rp0,-

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,-*

C.24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0,-*

C.25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat Utang Pihak Ketiga pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.09) per tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp0,-,-*

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,-, dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNPB
Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Pendapatan PNPB pada saat tanggal pelaporan.

Beban Pegawai
Rp0,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

Beban Persediaan
Rp0,-

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada *Rincian Beban Pegawai* 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan

*Beban Barang dan
Jasa
Rp97.284.350,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp97.284.350,- dan Rp128.413.000,-. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	PENGEMBALIAN BELANJA	TH 2022
Beban Barang Operasional	-	-	56.732.000
Beban Bahan	80.984.350	-	57.236.000
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	-
Beban Barang Non Operasional Penanganan	-	-	-
Beban Jasa Konsultan	-	-	-
Beban Jasa Pos dan Giro	-	-	-
Beban Sewa	-	-	-
Beban Jasa Profesi	16.300.000	-	9.000.000
Beban Jasa Penanganan Pandemi Covid 19	-	-	5.445.000
JUMLAH	97.284.350	-	128.413.000

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban
Pemeliharaan Rp0,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja

Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Perjalanan Dinas
Rp138.199.000,-

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp138.199.000,- dan Rp96.569.000,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	Pengembalian Belanja	TH 2022
Beban Perjalanan Biasa	66.049.000		59.819.000
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	72.150.000	-	36.750.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-		-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-		-
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	138.199.000	-	96.569.000

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
Rp0,-

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk

mencapai tujuan entitas.

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Bantuan Sosial Rp0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyisihan Piutang Tak

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan

Tertagih Rp0,-

beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan

*Beban Lain-lain
Rp0,-*

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2023.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

*Pos Luar Biasa
Rp0,-*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- .

Defisit LO

Rp235.483.350,-

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp235.483.350,- dan Rp224.982.000,-. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan

Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan pada tanggal pelaporan.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai. Tidak terdapat koreksi aset tetap non revaluasi pada tanggal pelaporan.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp235.483.350,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp235.483.350,- dan Rp224.982.000,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	
Ditagihkan ke Entitas Lain	235.483.350
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	
Jumlah	235.483.350

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

DKEL

Rp235.483.350,-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp0,-, sedangkan DKEL sebesar Rp Rp235.483.350,-.

Transfer

Masuk/ Keluar

Rp0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Terdapat Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-.

Pengesahan/

Pengembalian

Hibah Langsung

Rp0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,-.

dari total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2022. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0,-. Tidak terdapat pengesahan Hibah untuk tahun 2023 dan 2022.

Ekuitas Akhir

Rp0,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 653986489951000
Nama Rekening : BPG 020 KNWL HUKUM DAN
HAM BANTEN 648995
Nama Bank : BRI Kantor Pusat
Surat Izin : S-1353/WPB.12/KP.05/2021
Tanggal : 06-07-2020

2. Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W.12-69.KU.03.03 Tahun 2024 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pegawai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2024, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 :

KPA : Dodot Adikoeswanto
PPK : Emiel Amarulla
Bendahara : Hafin Jaya Wardana

3. Di TA 2023 ini tidak terdapat Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid 19 (521131)
4. Di TA 2023 ini tidak terdapat Belanja Jasa – Penanganan Pandemi Covid 19 (522192)



LAMPIRAN

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM BANTEN
648995

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN HAK ASASI MANUSIA 09
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648995

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 9:01 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	235,484,000	235,483,350	(650)	100	224,984,000	224,982,000	(2,000)	100
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	235,484,000	235,483,350	(650)	100	224,984,000	224,982,000	(2,000)	100
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN HAK ASASI MANUSIA 09
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648995

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 9:01 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	235,484,000	235,483,350	(650)	100	224,984,000	224,982,000	(2,000)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

null, 25 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KRA



DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 09
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 648995
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN HAK ASASI MANUSIA
BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 25/01/24 9:02 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	78,372,000	80,985,000	80,984,350	0	80,984,350	100	650
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	78,372,000	80,985,000	80,984,350	0	80,984,350	100	650
5221	Belanja Jasa							
522151	Belanja Jasa Profesi	14,400,000	16,300,000	16,300,000	0	16,300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	14,400,000	16,300,000	16,300,000	0	16,300,000	100	0
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	53,252,000	66,049,000	66,049,000	0	66,049,000	100	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	89,460,000	72,150,000	72,150,000	0	72,150,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	142,712,000	138,199,000	138,199,000	0	138,199,000	100	0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	235,484,000	235,484,000	235,483,350	0	235,483,350	100	650
	JUMLAH BELANJA	235,484,000	235,484,000	235,483,350	0	235,483,350	100	650

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648995) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 9:01 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	

Keterangan :
FINAL

25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA
DODOT ADIKOESWANTO
197110211994031001



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648995) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 9:01 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	235,483,350
3.0	521211	Beban Bahan	80,984,350	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	16,300,000	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	66,049,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	72,150,000	0
JUMLAH			235,483,350	235,483,350

Keterangan :
FINAL

25 Januari 2024
Kepala Kantor Wilayah UAKPA
KPA
DODOPADIKOESWANTO
197410211994031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648995) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 9:01 AM
Halaman : 1
lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	235,483,350
3.0	521211	Belanja Bahan	80,984,350	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	16,300,000	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	66,049,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	72,150,000	0
JUMLAH			235,483,350	235,483,350

Keterangan :
FINAL

null, 25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648995) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 9:01 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	97,284,350	128,413,000	(31,128,650)	(24.241)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	138,199,000	96,569,000	41,630,000	43.109
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648995) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 9:01 AM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	235,483,350	224,982,000	10,501,350	4.668
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(235,483,350)	(224,982,000)	(10,501,350)	4.668
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(235,483,350)	(224,982,000)	(10,501,350)	4.668
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(235,483,350)	(224,982,000)	(10,501,350)	4.668

Keterangan :
FINAL

null, 25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (09) DITJEN HAK ASASI MANUSIA

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648995) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 9:01 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(235,483,350)	(224,982,000)	(10,501,350)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	235,483,350	224,982,000	10,501,350	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	-
EKUITAS AKHIR	0	0	0	-

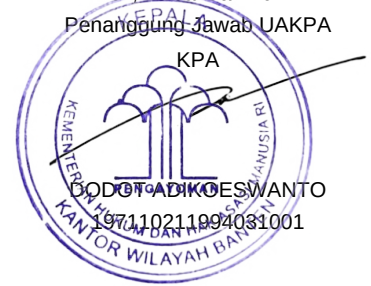
Keterangan :

FINAL

null, 25 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



DODOT ADIKOESWANTO

197110211994031001





LAPORAN KEUANGAN

**KANWIL KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAM BANTEN
(07/648993)**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
TANGGAL 31 DESEMBER 2023**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07). Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP. 197110211994031001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	25
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	34
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	43
F. Pengungkapan Penting Lainnya	47
VI. Lampiran dan Daftar	

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN

JL. KH SYAM'UN NO. 44D SERANG
TELEPON 0245. 223104, 0254 217029 FAXIMILE 0254 223104

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi serta kinerja keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Serang, 31 Desember 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,

Dodot Adikoeswanto
NIP.197410211994031001

Laporan Keuangan Semester I KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (013.07) Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp0,- atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2023 adalah sebesar Rp1.728.154.231 atau mencapai 99,88 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.730.303.000,-.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp0,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp0,-; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,-.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0, sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp1.728.154.231,- sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan

Operasional senilai (Rp1.728.154.231,-). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan sebesar Rp0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp1.728.154.231,-).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp0,- dikurangi Defisit-LO sebesar (Rp1.728.154.231,-) ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0,- dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp1.728.154.231,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp0,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (07) LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2023		% thd Angg	TA 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-	-	-
BELANJA	B.2.				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	1.730.303.000	1.728.154.231	99,88	974.134.682
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		1.730.303.000	1.728.154.231	99,88	974.134.682

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (07) NERACA PER 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.4	-	-
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih harus Diterima	C.9	-	-
Persediaan	C.10	-	-
Jumlah Aset Lancar		-	-
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	-	-
Peralatan dan Mesin	C.15	-	-
Gedung dan Bangunan	C.16	-	-
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.17	-	-
Aset Tetap Lainnya	C.18	-	-
Konstruksi dalam pengerjaan	C.19	-	-
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	-	-
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	-	-
Aset Lain-Lain	C.22	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		-	-
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Uang Muka dari KPPN	C.24	-	-
Utang kepada Pihak Ketiga	C.25	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	-	-
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN		-	-
EKUITAS			
Ekuitas	C.28	-	-
JUMLAH EKUITAS		-	-
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (07) LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	-	-
JUMLAH PENDAPATAN		-	-
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	-	-
Beban Persediaan	D.3	-	-
Beban Barang dan Jasa	D.4	508.641.100	254.729.000
Beban Pemeliharaan	D.5	-	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	1.219.513.131	799.916.682
Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
JUMLAH BEBAN		1.728.154.231	1.054.645.682
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(1.728.154.231)	(1.054.645.682)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11		
Surplus Penjualan Aset Nonlancar		-	-
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(1.728.154.231)	(1.054.645.682)
POS LUAR BIASA	D.12		
Pendapatan PNB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(1.728.154.231)	(1.054.645.682)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN (07) LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 31 DESEMBER 2022

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31-Dec-23	31-Dec-22
EKUITAS AWAL	E.1	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(1.728.154.231)	(1.054.645.682)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN	E.3.1	-	-
KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3.2	-	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.3	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.4	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.5	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.6	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN		-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	1.728.154.231	1.054.645.682
EKUITAS AKHIR	E.5	-	-

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07)

Dasar Hukum Entitas dan Rencana Strategis Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Nomor : 30 Tahun 2018 Tanggal 16 Oktober 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia R.I., Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. R.I. adalah Instansi Vertikal Kementerian Hukum dan HAM yang berkedudukan di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan HAM. R.I.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM. R.I. dalam wilayah propinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan HAM. R.I. dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) berkedudukan di Serang-Banten. Rencana strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten antara lain:

1. Penyebaran informasi di bidang Kekayaan Intelektual dalam bentuk pemberian sosialisasi kepada para pemangku kepentingan di antaranya kalangan perguruan tinggi, para pelaku Usaha Kecil dan menengah, serta masyarakat secara umum.
2. Penerapan sistem *Industrial Property Automation System* (IPAS) untuk penerimaan permohonan Kekayaan Intelektual hingga penyelesaiannya. Hal ini bertujuan agar kualitas pelayanan publik dapat ditingkatkan serta percepatan penyelesaian permohonan Kekayaan Intelektual secara efektif dan efisien.

3. Penyelesaian pendaftaran Indikasi Geografis (IG) sebanyak 30 IG terdaftar sebagai wujud perlindungan terhadap potensi kekayaan alam di seluruh wilayah Indonesia.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Semester II TA 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07) menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat

transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07) dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan

penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07). Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07) adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

• **Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

• **Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 1. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan

2. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 3. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

- **Belanja**

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

- **Beban**

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

• **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa

Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

*Piutang
Jangka
Panjang*

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

*Aset
Lainnya*

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat

neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

f. Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

g. Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013. 07) melaksanakan kegiatan berdasarkan pagu anggaran yang terdapat dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: SP DIPA- 013.07.2.648993/2024 tanggal 24 November 2023. Satker 648993 belum mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Adapun rincian DIPA tersebut :

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	1.730.303.000	1.730.303.000
Belanja Modal	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Jumlah Belanja	1.730.303.000	1.730.303.000

*Realisasi
Pendapatan
Rp0,-*

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,- atau mencapai 0,- persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp0,-. Tidak terdapat Pendapatan pada DIPA Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (07).

*Realisasi
Belanja
Negara
Rp1.728.154.231,-*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.728.154.231,- atau 99,88% dari anggaran belanja sebesar Rp1.730.303.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2023

Uraian	31-Dec-23		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.730.303.000	1.728.154.231	99,88
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Total Belanja Kotor	1.730.303.000	1.728.154.231	99,88
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	1.730.303.000	1.728.154.231	99,88

Dibandingkan dengan 31 Desember 2022, Realisasi Belanja per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 63,86% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya.

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	1.728.154.231	1.054.645.682	63,86
Belanja Modal	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	1.728.154.231	1.054.645.682	63,86

*Belanja
Pegawai
Rp0,-*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Realisasi belanja pegawai pada saat tanggal pelaporan.

Belanja

Barang

Rp1.728.154.231

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1,728,154,231,- dan Rp Rp1.054.645.682. Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 63,86% dari Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2022. Hal ini antara lain disebabkan oleh adanya kenaikan realisasi Belanja Jasa Sebesar 1.990,73%, Belanja Perjalanan Dinas sebesar 52,46% dan penurunan belanja Non Operasional 33,00% dibandingkan realisasi per 31 Desember 2022.

Perbandingan Belanja Barang TA 2023 dan 2022

URAIAN	REALISASI 31 DESEMBER 2023	REALISASI 31 DESEMBER 2022	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	159.490.000	238.029.000	(33,00)
Belanja Jasa	349.151.100	16.700.000	1.990,73
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.219.513.131	799.916.682	52,46
Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masy.	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	1.728.154.231	1.054.645.682	63,86
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	1.728.154.231	1.054.645.682	63,86

Belanja

Modal Rp0,-

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal pada per 31 Desember 2023.

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi per 31 Desember 2023.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023.

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023.

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat realisasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Realisasi Belanja Modal Lainnya per 31 Desember 2023.

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan per

31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat Belanja bantuan sosial per 31 Desember 2023.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran
Rp0,-*

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Tidak terdapat Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada saat tanggal pelaporan.

*Kas di
Bendahara
Penerimaan
Rp0,-*

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat saldo di Bendahara Penerimaan pada saat tanggal pelaporan.

*Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp0,-*

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi

kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan.

Piutang Bukan Pajak **C.4 Piutang Bukan Pajak**

Pajak

Rp0,-

Saldo Piutang PNBPN per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Piutang PNBPN merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Tidak terdapat saldo Piutang PNBPN pada saat tanggal pelaporan.

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) **C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)**

TP/TGR

Rp0,-

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Tidak Terdapat Bagian lancar TP/TGR pada tanggal pelaporan.

*Bagian Lancar
TPA
Rp0,-*

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0,-. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Pendek
Rp0,-*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Jangka Pendek

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan.

*Belanja
Dibayar di
Muka Rp0,-*

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/ jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

*Pendapatan
yang Masih
Harus Diterima
Rp0,-*

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Tidak terdapat Pendapatan yang Masih Harus Diterima pada saat tanggal pelaporan.

*Persediaan
Rp0,-*

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Tidak terdapat Persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Tagihan
TP/TGR
Rp0,-*

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian

yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

*Tagihan
Tuntutan
Penjualan
Angsuran –
Rp0,-*

C.12 Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi. Tidak terdapat Tagihan Penjualan Angsuran pada tanggal pelaporan.

*Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
Rp0,-*

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

*Tanah
Rp0,-*

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat aset berupa tanah pada saat tanggal pelaporan.

*Peralatan dan
Mesin
Rp 0,-*

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Peralatan dan Mesin

pada saat tanggal pelaporan.

*Gedung dan
Bangunan
Rp0,-*

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi tambah ataupun kurang atas Gedung dan Bangunan pada saat tanggal pelaporan.

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi
Rp0,-*

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan.

*Aset Tetap
Lainnya
Rp0,-*

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset tetap tersebut berupa barang bercorak kesenian. Tidak terdapat Aset tetap lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,-*

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,- yang merupakan pembangunan gedung tempat kerja berupa perpustakaan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat

konstruksi dalam pengerjaan pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
Aset Tetap
Rp0,-*

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Tidak terdapat Akumulasi Penyusutan Aset pada saat tanggal pelaporan.

*Aset Tak
Berwujud
Rp0,-*

C.21 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten (013.07) tidak mempunyai aset tak berwujud pada saat tanggal pelaporan.

*Aset Lain-Lain
Rp0,-*

C.22 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Tidak terdapat Aset Lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Akumulasi
Penyusutan
dan Amortisasi
Aset Lainnya
Rp0,-*

C.23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp0,- dan Rp0,-. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Tidak terdapat Akumulasi penyusutan Aset lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Uang Muka
dari KPPN
Rp0,-*

C.23 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

*Utang kepada
Pihak Ketiga
Rp0,-*

C.24 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Tidak terdapat utang kepada pihak ketiga pada saat tanggal pelaporan.

*Pendapatan
Diterima di
Muka
Rp0,-*

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, tidak terdapat pendapatan diterima di muka pada saat tanggal pelaporan.

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp0,-*

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,- dan Rp0,-, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya. Tidak terdapat beban yang masih harus dibayar pada saat tanggal pelaporan.

*Ekuitas
Rp0,-*

C. Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Pendapatan PNB
Rp0,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Pendapatan PNB pada saat tanggal pelaporan.

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Tidak terdapat Beban Pegawai pada saat tanggal pelaporan.

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Beban Persediaan
Rp0,-

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Tidak terdapat Beban persediaan pada saat tanggal pelaporan.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp508.641.100,-*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp508.641.100,- dan Rp254.729.000,- Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	PENGEMBALI AN BELANJA	TH 2022
Beban Bahan	159.490.000		95.409.000
Beban Penanganan Pandemi Covid 19	-		
Beban Honor Output Kegiatan	-	-	
Beban Jasa Lainnya	288.564.100	-	
Beban Sewa	35.537.000		
Beban Barang Non Operasional lainnya	-	-	93.500.000
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	49.120.000
Beban Jasa Profesi	25.050.000	-	3.600.000
Beban Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	-	-	13.100.000
JUMLAH	508.641.100	0	254.729.000

Nilai tersebut jika dibandingkan dengan Belanja Barang dan Jasa pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban
Pemeliharaan Rp0,-
,-*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Tidak terdapat Beban Pemeliharaan

pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Barang Pemeliharaan pada LRA tidak terdapat selisih.

*Beban Perjalanan Dinas
Rp1.219.513.131,-*

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.219.513.131,- dan Rp 799.916.682,-. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel . Rincian Beban Perjalanan Dinas
TA 2023 dan 2022*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2023	Pengembalian Belanja	TH 2022
Beban Perjalanan Biasa	316.704.932	-	133.632.182
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33.450.000	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	869.358.199	-	666.284.500
Jumlah Beban Perjalanan Dinas	1.219.513.131	-	799.916.682

Nilai tersebut diatas jika dibandingkan dengan Belanja Perjalanan Dinas pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022

Rp0,-

adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

Tidak terdapat Beban yang diserahkan kepada masyarakat pada saat tanggal pelaporan.

Nilai tersebut di atas jika dibandingkan dengan Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat pada LRA tidak terdapat selisih.

Beban Bantuan Sosial Rp0,-

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

Tidak terdapat Beban Bantuan Sosial pada saat tanggal pelaporan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp0,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tidak terdapat Beban Penyusutan dan Amortisasi pada saat tanggal pelaporan.

*Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0,-*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada saat tanggal pelaporan

*Beban Lain-lain
Rp0,-*

D.11 Beban Lain-lain

Jumlah Beban Lain-lain untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Tidak terdapat belanja Lain-Lain untuk Tahun 2023.

*Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp0,-*

D.12 Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp0,- dan Rp0,-.

*Pos Luar Biasa
Rp0,-*

D.13 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat

diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat Pos Luar Biasa untuk Tahun 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp0,-

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

Defisit LO

(Rp1.728.154.231,-)

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar (1.728.154.231,-) dan (1.054.645.682,-). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Penyesuaian Nilai

Aset

Rp0,-

E.3.1 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai

Persediaan Rp0,-

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2023.

*Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp0,-*

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Tidak terdapat selisih revaluasi aset tetap lainnya pada saat tanggal pelaporan.

*Koreksi Aset Tetap
Non Revaluasi
Rp0,-*

E.3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

*Koreksi Lain-Lain
Rp0,-*

E.3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Tidak terdapat Koreksi lain-lain pada saat tanggal pelaporan.

*Transaksi Antar
Entitas
Rp1.728.154.231,-*

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp1.728.154.231,- dan Rp1.054.645.682,-. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar

BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	-
Ditagihkan ke Entitas Lain	1.728.154.231
Transfer Masuk	-
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	1.728.154.231

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

DKEL

Rp1.728.154.231,-

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar Rp0,- sedangkan DKEL sebesar Rp1.728.154.231,-.

Transfer

Masuk/ Keluar

Rp0,-

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Tidak terdapat Transfer Masuk / keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.

Pengesahan dan

Pengembalian

Hibah Langsung

Rp0,-

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung

sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp0,- dari total Rp0,- yang diterima sepanjang semester I tahun 2023. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah Rp0,-.

Tidak terdapat pengesahan Hibah sampai dengan tanggal pelaporan.

Ekuitas Akhir
Rp0,-

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA.

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2 . PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

1. Rekening yang digunakan Bendahara Pengeluaran

Nomor Rekening : 650476489931000

Nama Rekening : BPG 020 KNWL HUKUM DAN HAM
BANTEN 648993

Nama Bank : BRI KC Serang

Surat Izin : S-829/WPB.12/KP.05/2020

Tanggal : 08-05-2020

2. Pejabat Pengelola Keuangan

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor: W.12.411.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Nomor W.12.70.KU.03.03 Tahun 2023 Tentang Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM), dan Pegawai Pengelola Administrasi Belanja Pegawai (PPABP) Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten TA 2023, daftar Pejabat Pengelola Keuangan Tahun Anggaran 2023 :

KPA : Dodot Adikoeswanto

PPK : Emiel Amarulla

Bendahara : Hafin Jaya Wardana



LAMPIRAN

**KANWIL KEMENTERIAN HUKUM
DAN HAM BANTEN
(07/648993)**

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 07
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648993

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 8:52 AM
Halaman : 1
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
A. Pendapatan Negara Dan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Pendapatan Perpajakan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Pendapatan Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Belanja Negara	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Belanja Pemerintah Pusat	1,730,303,000	1,728,154,231	(2,148,769)	100	1,056,476,000	1,054,645,682	(1,830,318)	100
1. Belanja Pegawai	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Belanja Barang	1,730,303,000	1,728,154,231	(2,148,769)	100	1,056,476,000	1,054,645,682	(1,830,318)	100
3. Belanja Modal	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Transfer ke Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



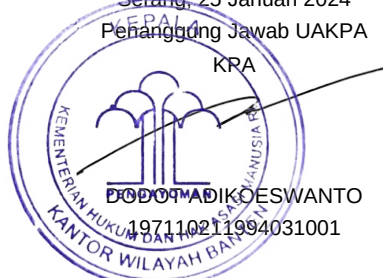
KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL 07
SATUAN KERJA : KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN 648993

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 8:52 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	1,730,303,000	1,728,154,231	(2,148,769)	100	1,056,476,000	1,054,645,682	(1,830,318)	100
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Serang, 25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KRA

PODOYO ADIKOESWANTO
197110211994031001

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 07
WILAYAH/PROVINSI : 2900
SATUAN KERJA : 648993
JENIS SATUAN KERJA : KD

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
BANTEN
KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 25/01/24 8:52 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker
 Tgl Data : 25/1/24 7:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	3,500,000	0	0	0	0		0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	3,500,000	0	0	0	0		0
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	105,053,000	160,128,000	159,490,000	0	159,490,000	99.6	638,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	105,053,000	160,128,000	159,490,000	0	159,490,000	99.6	638,000
5221	Belanja Jasa							
522141	Belanja Sewa	0	35,537,000	35,537,000	0	35,537,000	100	0
522151	Belanja Jasa Profesi	15,300,000	25,400,000	25,050,000	0	25,050,000	98.62	350,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	492,000,000	288,600,000	288,564,100	0	288,564,100	99.99	35,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	507,300,000	349,537,000	349,151,100	0	349,151,100	99.89	385,900
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	209,050,000	317,729,000	316,704,932	0	316,704,932	99.68	1,024,068
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,400,000	33,500,000	33,450,000	0	33,450,000	99.85	50,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	900,000,000	869,409,000	869,358,199	0	869,358,199	99.99	50,801
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	1,114,450,000	1,220,638,000	1,219,513,131	0	1,219,513,131	99.91	1,124,869
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	1,730,303,000	1,730,303,000	1,728,154,231	0	1,728,154,231	99.88	2,148,769
	JUMLAH BELANJA	1,730,303,000	1,730,303,000	1,728,154,231	0	1,728,154,231	99.88	2,148,769

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN
SATUAN KERJA : (648993) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM
Tgl Cetak : 25/01/24 8:52 AM
Halaman : 1
lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5

JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	0	0	0	

Keterangan :
FINAL

Serang, 25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA
KPA
PENGAYOMAN
DODOT ADIKOESWANTO
197190211994031001

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648993) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 8:52 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,728,154,231
3.0	521211	Beban Bahan	159,490,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	35,537,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	25,050,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	288,564,100	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	316,704,932	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,450,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	869,358,199	0
JUMLAH			1,728,154,231	1,728,154,231

Keterangan :

FINAL

Serang, 25 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA



NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648993) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 8:52 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	1,728,154,231
3.0	521211	Belanja Bahan	159,490,000	0
3.0	522141	Belanja Sewa	35,537,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	25,050,000	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	288,564,100	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	316,704,932	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	33,450,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	869,358,199	0
JUMLAH			1,728,154,231	1,728,154,231

Keterangan :

FINAL

Serang, 25 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA



LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648993) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 8:50 AM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	0	0	0	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	0	0	0	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	0	0	0	
Beban Barang dan Jasa	508,641,100	254,729,000	253,912,100	99.679
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	1,219,513,131	799,916,682	419,596,449	52.455
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648993) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 8:50 AM

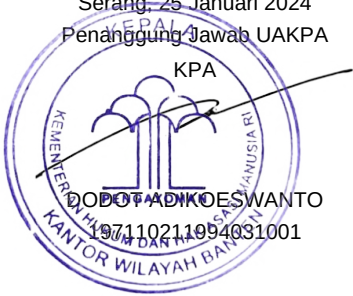
Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	1,728,154,231	1,054,645,682	673,508,549	63.861
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(1,728,154,231)	(1,054,645,682)	(673,508,549)	63.861
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(1,728,154,231)	(1,054,645,682)	(673,508,549)	63.861
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(1,728,154,231)	(1,054,645,682)	(673,508,549)	63.861

Keterangan :
FINAL

Serang, 25 Januari 2024
Penanggung Jawab UAKPA



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (07) DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

WILAYAH/PROVINSI : (2900) BANTEN

SATUAN KERJA : (648993) KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN

Tgl Data : 25/01/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 25/01/24 8:51 AM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(1,728,154,231)	(1,054,645,682)	(673,508,549)	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	1,728,154,231	1,054,645,682	673,508,549	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	0	0	0	-
EKUITAS AKHIR	0	0	0	-

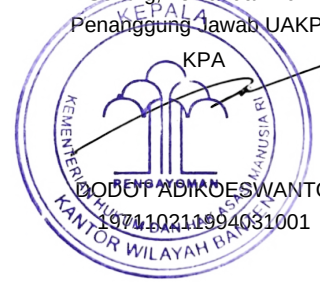
Keterangan :

FINAL

Serang, 25 Januari 2024

Penanggung Jawab UAKPA

KPA



BOBOT ADIKOESWANTO

197110211994031001

